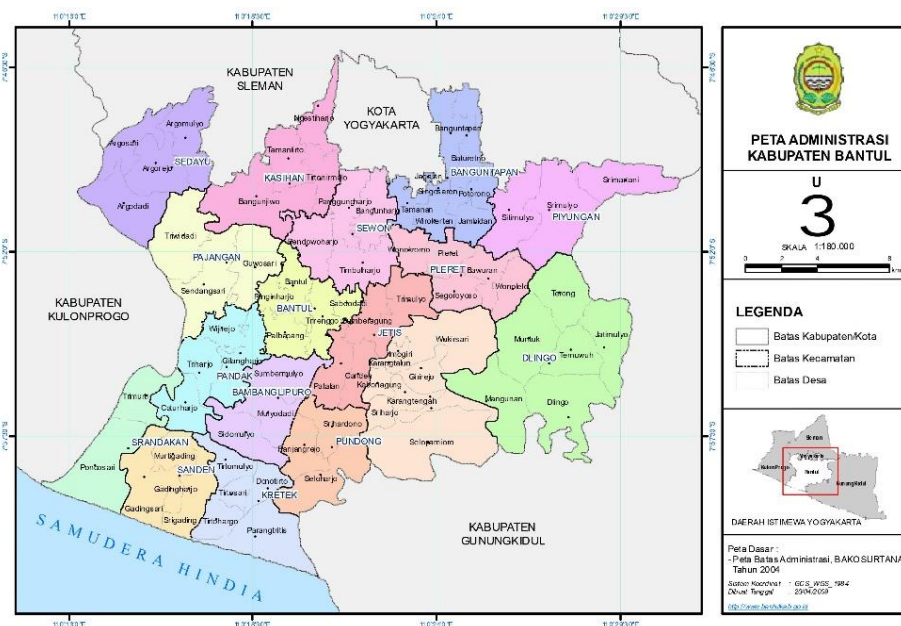


BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara astronomis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50"-27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah timur, berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021). Adapun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Sedayu (BPS Kabupaten Bantul, 2021) seperti yang diperlihatkan pada Gambar berikut:



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Sumber: bantulkab.go.id, 2004

Berdasarkan peta administrasi tersebut diketahui bahwa terdapat tiga kecamatan yang berhadapan secara langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Sebagai kecamatan yang berada di wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan memiliki potensi pariwisata pantai. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, pantai dengan jumlah wisata yang paling banyak dibandingkan pantai-pantai di Provinsi D.I. Yogyakarta berada di wilayah Kecamatan Kretek yaitu Pantai Parangtritis yang berada di Kelurahan Parangtritis. Adapun kelurahan-kelurahan di Kecamatan atau Kapanewon Kretek beserta luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan/Kapanewon Kretek

No.	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Luas Kecamatan (%)
1.	Tirtohargo	3,62	13,52
2.	Parangtritis	11,87	44,34
3.	Donotirto	4,70	17,56
4.	Tirtosari	2,39	8,93
5.	Tirtomulyo	4,19	15,65
Jumlah		26,77	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Parangtritis adalah kelurahan yang paling luas dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan/Kapanewon Kretek

No.	Kelurahan	Penduduk			Kepadatan Penduduk per km ²
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Tirtoharjo	1.435	1.456	2.891	799
2.	Parangtritis	3.831	4.075	7.906	666
3.	Donotirto	4.052	4.278	8.330	1.772
4.	Tirtosari	2.120	2.205	4.325	1.810
5.	Tirtomulyo	3.381	3.484	6.865	1.638
Jumlah		14.819	15.498	30.317	1.132

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Parangtritis sebanyak 7.906 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 666 jiwa per km². Meskipun kepadatan penduduk di Kelurahan Parangtritis tidak sebesar kelurahan lain di Kapanewon Kretek, namun di Kelurahan Parangtritis memiliki pantai yang selalu dijadikan destinasi utama oleh kebanyakan wisatawan yang datang ke Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pariwisata D.I.Yogyakarta (2020), pada tahun 2019 jumlah wisatawan di Pantai Parangtritis sebanyak 2.789.354 orang.



Gambar 4.2 Wisatawan Pantai Parangtritis

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Sebagai pantai yang berhadapan langsung dengan zona subduksi, Pantai Parangtritis memiliki tingkat bahaya tsunami yang tinggi (BNPB, 2019). Sehingga wilayah tersebut rentan terhadap gempa dan tsunami. Adanya penelitian yang dilakukan oleh LIPI terkait tsunami purba di pantai-pantai di selatan Pulau Jawa (Priatmojo, 2020), sekaligus menjadi peringatan bahwa bencana tsunami bisa berulang dan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan. Pada tahun 2006, Pantai Parangtritis pernah dilanda tsunami dengan pusat gempa di Pangandaran. Tsunami tersebut menjangkau 100 meter ke arah daratan (Shalihah, 2021). Meskipun tsunami tersebut bukanlah tsunami besar yang mampu merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa bahaya tsunami yang lebih besar mungkin saja terjadi.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian terkait kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara kepada sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang meliputi; Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Wakil Koordinator Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, PLT Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul, Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Staf Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul, Panewu Anom Kapanewon Kretek, Kawat Sosial Kapanewon Kretek, Lurah Kelurahan Parangtritis, Kamituwo Kelurahan Parangtritis, Ketua FPRB Paris Tangguh, Ketua RT 05, dan Ketua RT 06 Kelurahan Parangtritis. Selain melakukan wawancara dengan pejabat dan staf Pemerintah Kabupaten Bantul, wawancara juga dilakukan kepada pedagang dan wisatawan yang ada di

Pantai Parangtritis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua berupa bagaimana pemahaman masyarakat dan wisatawan terkait kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis. Dalam penelitian ini, observasi dan dokumentasi juga dilakukan dengan tujuan agar dapat mengkonfirmasi hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

4.2.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai didapatkan melalui wawancara dengan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang sesuai dengan bidang kesiapsiagaan bencana dengan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006).

4.2.1.1 Pengetahuan

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan Pemerintah kabupaten Bantul, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan narasumber terkait bencana tsunami. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh instansi sudah mampu menjawab dan memberikan penjelasan dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

a. Dampak bencana yang ditimbulkan

Seluruh narasumber mampu menjelaskan terkait dampak bencana yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, narasumber telah mengetahui bahwa tsunami dapat memberikan dampak mulai dari kerusakan infrastruktur, ancaman keselamatan baik untuk masyarakat setempat, pedagang, maupun wisatawan, terganggunya perekonomian, dan adanya masalah Kesehatan yang timbul akibat berada di pengungsian.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang beliau dapatkan dari BMKG, tsunami besar pernah terjadi di wilayah DIY, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang telah dilakukan terkait bekas-bekas tsunami yang pernah terjadi sekitar 500 tahun yang lalu (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Wakil Koordinator Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bantul lebih lanjut menjelaskan bahwa seandainya terjadi tsunami di wilayah Bantul, tentu akan berdampak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa tsunami yang terjadi di kawasan pantai, baik itu Pantai Parangtritis, Pantai Samas, maupun Pantai Depok dapat memberikan dampak yaitu rusaknya permukiman, tempat wisata, dan kawasan pedagang yang berada di sekitar pantai (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Pernyataan dari pihak Satpol PP sejalan dengan pernyataan PLT Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul. Beliau menjelaskan bahwa, tsunami mampu memberikan dampak yang merugikan secara material berupa rusaknya rumah masyarakat dan bangunan di sekitar pantai (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul setuju jika tsunami dapat merusak infrastruktur (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Pihak PMI juga menambahkan bahwa tsunami juga akan berdampak pada masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mendirikan rumah sangat dekat pantai. Beliau juga menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPBD, di Kawasan Pantai Parangtritis radius tsunami bisa mencapai sekitar tiga kilometer dari bibir pantai. Pernyataan PMI terkait keselamatan

masyarakat sejalan dengan pernyataan Panewu Anom Kapanewon Kretek, bahwa tsunami yang melanda Pantai Parangtritis akan menyebabkan banyaknya korban. Hal ini dikarenakan Pantai Parangtritis selalu dipenuhi oleh pengunjung dan akan semakin ramai ketika libur sekolah. Ramainya pengunjung tentu menyebabkan banyaknya pedagang yang semakin merapat ke area pantai, sehingga memungkinkan jumlah korban akan lebih banyak dibandingkan daerah lain (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Hal tersebut juga disetujui oleh Lurah Parangtritis. Beliau menyampaikan bahwa Pantai Parangtritis sangat ramai baik dari banyaknya warga yang bermukim di dekat pantai, pedagang, maupun wisatawan, sehingga keselamatan warga akan terancam (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

Berdasarkan sudut pandang kesehatan, Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa, tsunami tentu akan menyebabkan korban luka, korban meninggal, dan ketika korban disatukan di pengungsian, maka akan muncul berbagai penyakit seperti diare dan batuk pilek (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ketua FPRB Paris Tangguh, bahwa akan ada kemungkinan korban luka sampai korban meninggal jika terjadi tsunami di Kawasan Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

Dari sisi pariwisata, dampak tsunami dijelaskan oleh Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Beliau menjelaskan bahwa seandainya terjadi tsunami, pelaku wisata akan paling terkena dampak. Hal ini dikarenakan ada banyak pedagang, penjual jasa, pedagang asongan, tukang parkir, dan wisatawan yang berlokasi sangat dekat dengan bibir pantai. Tsunami juga dapat menimbulkan dampak bagi Objek Wisata Pantai Parangtritis, dimana beberapa fasilitas tentu akan rusak, dan wisatawan akan takut untuk datang ke Pantai Parangtritis

(Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kawat Sosial Kapanewon Kretek, bahwa tsunami yang melanda objek wisata pantai akan mempengaruhi perekonomian (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Walaupun tsunami besar belum pernah dialami oleh warga di sekitar Pantai Parangtritis, namun Ketua RT 05 dan Ketua RT 06 mampu menjelaskan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi jika tsunami terjadi di kawasan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa akibat dari tsunami meliputi rumah-rumah yang rubuh, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di sekitar Pantai Parangtritis mendapatkan penghasilan dari berdagang, membuka penyewaan toilet dan kamar mandi umum, penginapan, jasa, dan sebagainya (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

b. Tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana

Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua instansi mengetahui terkait tipe-tipe maupun skala bencana. Hal tersebut hanya diketahui oleh pihak-pihak yang memang bergerak khusus di bidang kebencanaan, namun seluruh instansi mampu menjelaskan penyebab jika terjadi tsunami di Kabupaten Bantul.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul, Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Wakil Koordinator Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Panewu Anom Kapanewon Kretek, Lurah Parangtritis, Ketua FPRB Paris Tangguh, Ketua RT 05 dan Ketua RT 06 menjawab bahwa penyebab dari bencana tsunami adalah dari gempa bumi yang besar dan diikuti oleh surutnya air laut, kemudian muncul gelombang besar yang mengarah ke daratan (Wawancara Pribadi, 8; 8; 19; 16; 10; 15; 19;

22; 14; 14 November 2021). Berkaitan dengan tsunami yang pernah terjadi pada tahun 2006 di Kabupaten Bantul khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis, Ketua RT 05 menceritakan pengalamannya saat tsunami terjadi. Beliau mengatakan bahwa walaupun pusat gempa berada di Pangandaran, gelombang tsunami juga terjadi di Pantai Parangtritis. Setelah terdengar suara dentuman, laut terlihat seperti awan dan tiba-tiba saja air laut sudah sampai di depan rumahnya. Beliau juga mengatakan bahwa walau air tidak tinggi, namun tetap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk surut, sehingga banyak dari masyarakat lokal memutuskan untuk tetap mengungsi dan merasa takut untuk kembali ke rumah masing-masing (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Penyebab dan tipe tsunami secara lebih jelas diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul bahwa, karena adanya pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa, lalu menimbulkan tsunami, selain itu tsunami juga dapat disebabkan oleh longsor. Namun beliau menjelaskan kalau potensi tsunami yang ada di Kabupaten Bantul hanya disebabkan oleh gempa (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul bahwa, adanya pertemuan lempeng di selatan Pulau Jawa menyebabkan wilayah Kabupaten Bantul rawan terhadap gempa dan tsunami, sedangkan untuk tipe dan skala bencana akan dipengaruhi oleh besar kecilnya gempa dan tsunami yang terjadi (Wawancara Pribadi, 15 November).

c. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami

Seluruh instansi dapat menjelaskan terkait kerentanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa banyak masyarakat yang mendirikan rumah di dekat pantai, namun masyarakat telah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana tsunami, selain itu beberapa warga setempat telah

memiliki pengalaman tsunami yang terjadi pada tahun 2006, sehingga mereka memiliki pengetahuan tambahan terkait bencana tersebut.

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul percaya bahwa warga sekitar sudah mengerti risiko bencana yang ada di sekitar tempat tinggal mereka (Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang memiliki berbagai potensi bencana alam menyebabkan masyarakat sudah memiliki kesadaran akan bencana, selain itu masyarakat juga telah mendapatkan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul. Beliau menjelaskan bahwa adanya pengalaman tsunami 2006 dan informasi tsunami Aceh memberikan pengetahuan kepada masyarakat, selain itu pernah diadakan *drill* untuk bencana tsunami, serta adanya EWS yang dipasang di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul menjadikan tingkat kerentanan masyarakat dapat ditekan (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Sejalan dengan ungkapan tersebut, Wakil Koordinator Tagana Bantul mengungkapkan bahwa daerah pesisir Bantul sudah diadakan kegiatan yang berkaitan dengan bencana termasuk tsunami, sehingga masyarakat sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

PLT Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul mengatakan bahwa wilayah Parangtritis merupakan wilayah yang memiliki potensi tsunami, sehingga kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah sudah ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan dengan program-program seperti gladi, pelatihan, dan sosialisasi bencana.

Beliau juga mengatakan bahwa seandainya tsunami terjadi, maka kelompok rentan seperti lansia dan orang sakit akan menjadi prioritas untuk diselamatkan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Batul menjelaskan bahwa letak rumah penduduk di Pantai Parangtritis berada sangat dekat dengan pantai, namun kondisi tersebut dapat diatasi dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh FPRB yang terdiri dari anggota yang telah terlatih dan tereduksi terkait kebencanaan. Meski begitu, jika tsunami terjadi pada malam hari saat warga sedang tidur, maka korban yang akan ditimbulkan akan sangat besar. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di area sekitar pantai (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Kawat Sosial Kapanewon Kretek, beliau mengungkapkan bahwa kondisi tempat tinggal warga di Pantai Parangtritis sangat dekat dengan pantai. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah setempat berupaya untuk terus mengingatkan masyarakat terkait potensi tsunami dan cara menyelamatkan diri (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Lurah Parangtritis dan Kamituwo Kelurahan Parangtritis yang mengatakan bahwa sudah terdapat pelatihan untuk masyarakat yang diadakan oleh FPRB dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat (Wawancara Pribadi, 19; 11 November 2021). Ketua FPRB Paris Tangguh menjelaskan bahwa FPRB telah melibatkan 55 RT yang terdapat di Kelurahan Parangtritis. Selain itu, Ketua FPRB Paris Tangguh juga memperlihatkan Peta Tingkat Kerentanan Bencana dan Peta Kapasitas Masyarakat di Kelurahan Parangtritis (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).



Gambar 4.3 Peta Tingkat Kerentanan Bencana Desa Parangtritis

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan peta di atas, diketahui bahwa kerentanan tsunami tinggi dilambangkan dengan warna merah, kuning melambangkan kerentanan tsunami sedang, hijau melambangkan kerentanan tsunami rendah, biru melambangkan kerentanan longsor tinggi, dan arsiran melambangkan kerentanan banjir tinggi. Pada peta tersebut diketahui bahwa sebenarnya tingkat kerentanan tsunami di Pantai Parangtritis adalah tinggi. Namun, Ketua FPRB juga memperlihatkan Peta Kapasitas Masyarakat sebagai berikut.



Gambar 4.4 Peta Kapasitas Masyarakat Desa Parangtritis

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa merah melambangkan kapasitas masyarakat tinggi, kuning berarti kapasitas masyarakat sedang, dan kapasitas masyarakat yang

rendah dilambangkan dengan warna hijau. Dari peta di atas maka peneliti mengetahui bahwa kapasitas masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis adalah sedang.

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami juga dijelaskan oleh Ketua RT 05 dan Ketua RT 06, bahwa warga sudah paham ketika terjadi tsunami mereka harus lari ke tempat tinggi. Ketua RT 06 juga mengatakan bahwa adanya Tim SAR dan FPRB sangat membantu warga jika terjadi bencana (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

Menurut Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, seandainya terjadi tsunami maka masyarakat akan rentan saat di pengungsian. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh yang akan menurun ketika korban mengalami *stress*, berkumpul dengan banyak orang, serta masalah kebersihan yang sering terjadi di tempat pengungsian sehingga, korban pengungsian nantinya akan mudah terserang penyakit (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

d. Kondisi dan rencana fasilitas kritis

Ketika diberikan pertanyaan terkait kondisi dan rencana fasilitas kritis, seluruh instansi dapat menjelaskan dengan baik. di Kabupaten Bantul telah terdapat beberapa *shelter*, dan beberapa fasilitas kesehatan seperti bidan dan puskesmas.

Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa saat ini pembangunan tempat pengungsian sementara sedang direncanakan, hal ini dikarenakan walau sudah terdapat jalur tempat evakuasi tsunami, namun masih belum ada bangunan atau tempat yang aman dan dapat digunakan untuk menampung warga sementara (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Terkait jalur evakuasi juga diungkapkan oleh Wakil Koordinator Tagana Kabupaten Bantul bahwa, telah terdapat jalur

evakuasi yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa telah terdapat beberapa *shelter* di Jalan Lintas Selatan Pantai Baru, sedangkan di Pantai Parangtritis telah terdapat jalur-jalur evakuasi jika terjadi tsunami (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Berkaitan dengan *shelter* tersebut, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga mengungkapkan bahwa BPBD telah memiliki *shelter* (Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Pernyataan terkait *shelter* tersebut sejalan dengan ungkapan dari Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul juga menjelaskan bahwa jika rumah sakit darurat rubuh, mereka telah memiliki fasilitas yang diperlukan untuk membuat *shelter* darurat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Menurut Kawat Sosial Kapanewon Kretek, di Kecamatan Kretek belum memiliki rumah sakit yang besar dan memiliki fasilitas lengkap (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ketua RT 05 yang mengungkapkan bahwa tidak ada rumah sakit besar di Kapanewon Kretek, namun sudah terdapat Puskesmas (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penjelasan dari Lurah parangtritis, Kamituwo Kelurahan Parangtritis, Ketua FPRB Paris Tangguh, dan Ketua RT 06 mengatakan bahwa telah terdapat bidan dan Puskesmas di Kelurahan Parangtritis (Wawancara Pribadi, 19; 11; 22; 14 November 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, diketahui bahwa puskesmas memang menjadi ujung tombak dari Dinas Kesehatan, telah tersedia Tim Kaji Cepat dalam bidang kesehatan, sehingga kebutuhan terkait Tim Medis, obat-obatan, dan sebagainya dapat langsung dipersiapkan. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat sistem regional, seandainya

terjadi tsunami besar dan fasilitas kesehatan di wilayah Parangtritis tidak mampu menangani, maka akan diberikan bantuan dari fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan wilayah tersebut (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

Tersedianya fasilitas Kesehatan yang disebutkan oleh narasumber-narasumber di atas sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan/Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Kecamatan/ Kapanewon	Fasilitas Kesehatan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1.	Srandakan	1	2	1	1	2
2.	Sanden	-	1	1	3	3
3.	Kretek	-	2	1	4	3
4.	Pundong	-	-	1	-	3
5.	Bambanglipuro	2	2	2	3	2
6.	Pandak	1	2	2	2	4
7.	Bantul	3	5	2	4	5
8.	Jetis	2	3	2	3	4
9.	Imogiri	-	4	2	5	5
10.	Dlingo	-	5	2	3	4
11.	Pleret	1	1	2	5	4
12.	Piyungan	-	2	1	2	3
13.	Banguntapan	3	5	3	4	6
14.	Sewon	3	4	2	4	4
15.	Kasih	1	4	3	2	4
16.	Pajangan	-	3	1	2	2
17.	Sedayu	-	2	2	4	3
Kabupaten Bantul		17	47	30	51	61

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Bantul memiliki 17 rumah sakit, 47 poliklinik, 30 puskesmas, 51 puskesmas pembantu, dan 61 apotek yang tersebar di 17 kecamatan atau kapanewon di Kabupaten Bantul. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Kapanewon Kretek tidak memiliki rumah sakit, namun terdapat 2 poliklinik, 1 puskesmas, 4 puskesmas pembantu dan 3 apotek.

4.2.1.2 Kebijakan

Terdapat beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parang Tritis.

a. Kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul serta Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana mengungkapkan bahwa terdapat kebijakan terkait organisasi pengelola bencana yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bantul tentang pembentukan BPBD Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8; 16 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan terkait organisasi pengelola bencana dan antar instansi sering dilaksanakan latihan bersama (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh peneliti, terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bantul, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Selain Peraturan Daerah tersebut, BPBD juga sudah memiliki Rencana Strategis atau Renstra yang digunakan sebagai pedoman

bagi instansi-instansi yang bekerja di lingkungan BPBD Kabupaten Bantul. Renstra tersebut telah memuat tugas, fungsi, struktur organisasi, serta isu-isu strategis yang diangkat oleh BPBD Kabupaten Bantul.

b. Rencana aksi untuk tanggap darurat

Berkaitan dengan rencana aksi untuk tanggap darurat, tidak semua instansi paham apakah sudah tersedia atau belum. PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul mengaku bahwa beliau kurang paham terkait ketersediaan rencana aksi untuk tanggap darurat ini (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa rencana aksi untuk tanggap darurat tersedia di BPBD. Beliau juga mengatakan bahwa PMI hanya menjalankan apa yang dilakukan atau diperintahkan oleh BPBD berdasarkan rencana aksi tersebut (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Serupa dengan pernyataan PMI, Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga mengungkapkan bahwa rencana aksi ini tersedia di BPBD (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Menurut Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul, rencana aksi untuk tanggap darurat sudah tersedia. Beliau juga bercerita bahwa sudah pernah diadakan program ekspedisi tsunami yang dilaksanakan oleh BNPB, BPBD DIY, dan BPBD Bantul. ekspedisi tsunami itu dilaksanakan di daerah Parangtritis pada tahun 2019. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan terkait bencana tsunami ke sekolah, ke pasar, dan ke masjid dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Saat peneliti mewawancarai Ketua FPRB Paris Tangguh, beliau menjelaskan bahwa di FPRB sendiri sudah memiliki buku untuk

rencana aksi. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam rencana aksi tersebut tercantum pembagian tugas antar anggota. Dari hasil wawancara tersebut juga peneliti mengetahui bahwa Kabupaten Bantul belum memiliki Rencana Kontinjensi terbaru, hal ini dikarenakan adanya kondisi pandemi, sehingga pembuatan Renkon harus diundur (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

c. Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa tidak semua instansi yang terlibat dalam kebencanaan menyediakan alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana. Hal ini dikarenakan tidak semua instansi terlibat secara langsung pada kegiatan kesiapsiagaan, sehingga hanya instansi yang terlibat langsung saja yang memiliki alokasi dana untuk kesiapsiagaan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengaku bahwa Satpol PP tidak memiliki anggaran untuk kesiapsiagaan, namun memiliki anggaran untuk tanggap darurat, saat evakuasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dikarenakan Satpol PP lebih banyak membantu dan terlibat pada saat pelaksanaan tanggap darurat dan rehab rekon (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Dinas Sosial juga memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana, namun bersifat sebagai dana tak terduga. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Beliau menjelaskan bahwa dana tak terduga yang dimiliki oleh Dinas Sosial seringkali digunakan untuk kebutuhan pengungsian, air bersih, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan jenis bencananya. Meskipun telah mengajukan nominal yang dibutuhkan, namun nominal yang disetujui belum tentu sesuai dengan yang diajukan. Sehingga dana yang dialokasikan akan berbeda-beda nominalnya setiap tahun (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul menjelaskan bahwa BPBD memiliki alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana, namun dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi menyebabkan anggaran untuk kesiapsiagaan harus dipangkas (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Selanjutnya PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa bencana termasuk ke dalam standar pelayanan minimum, sehingga Bupati Bantul telah menyediakan dana untuk kesiapsiagaan dan dana darurat (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul juga mengaku bahwa PMI menyediakan alokasi dana untuk penanggulangan bencana setiap tahunnya. Anggaran dana yang disiapkan oleh PMI untuk penanggulangan bencana pada tahun 2021 sebesar 30 juta rupiah. Nominal dari anggaran ini berbeda setiap tahunnya, bergantung dengan pendapatan PMI yang berasal dari Bulan Dana Masyarakat (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Kawat Sosial Kapanewon Kretek menjelaskan bahwa pihak Kapanewon hanya memfasilitasi tempat kegiatan, sedangkan alokasi dana untuk kesiapsiagaan disediakan untuk di kelurahan-kelurahan karena dana tersebut digunakan oleh FPRB (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Penjelasan tersebut sejalan dengan ungkapan Lurah Prangtritis yang menjelaskan bahwa dana yang disediakan untuk penanganan bencana minimal 8% dari dana yang diberikan oleh pusat. Selain itu, terdapat Dana Desa yang juga disisihkan untuk bencana. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua FPRB Paris Tangguh juga menjelaskan bahwa FPRB didukung dan dianggarkan dana oleh Kelurahan Parangtritis. Anggaran yang disediakan berasal dari Dana Desa yang setiap tahunnya selalu diberikan. Bahkan dimasa pandemi COVID-19 ini, FPRB Paris Tangguh diberikan dana 2x lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini

dikarenakan FPRB dipercaya sebagai garda terdepan yang berinteraksi dan menangani bencana secara langsung di masyarakat (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

d. Kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung kesiapsiagaan di Kabupaten Bantul sudah tersedia. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul, pihak BPBD sudah memiliki Rencana Strategis tahun 2016-2021 (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Selain BPBD, PMI Kabupaten Bantul juga memiliki Rencana Strategis PMI tahun 2019-2024 (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Selanjutnya PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa pihak Bappeda memiliki RPJMD sebagai kebijakan yang mendukung kesiapsiagaan. Beliau menjelaskan bahwa RPJMD tersebut sudah mencakup semua termasuk BPBD, selanjutnya BPBD membuat Renstra yang mengacu pada RPJMD yang ada. Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam RPJMD tersebut terdapat lima misi. Misi ke empat dalam RPJMD tersebut berkaitan dengan kebencanaan. Selain RPJMD, terdapat RTRW yang di dalamnya juga terdapat IMB (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

e. Peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan

Ketika narasumber diberikan pertanyaan terkait apakah peraturan tentang organisasi pengelola bencana dan protap pelaksanaan, hanya beberapa instansi yang dapat menjawab, sedangkan yang lainnya menjawab tidak tahu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul, telah terdapat Peraturan Daerah yang berkaitan

dengan organisasi pengelola bencana (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dari PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul dan Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul yang mengungkapkan bahwa peraturan tersebut berupa Perda (Wawancara Pribadi, 8; 15 November 2021). Berdasarkan dokumen yang didapatkan peneliti terkait peraturan organisasi pengelola bencana, diketahui terdapat beberapa peraturan seperti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 yang membahas pembentukan dan susunan organisasi BPBD di Kabupaten Bantul, Perka BNPB Nomor 8 Tahun 2011 yang membahas tentang standardisasi data kebencanaan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan tanggung jawab sosial, Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 mengenai tugas, fungsi, serta tata kerja BPBD Bantul, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 mengenai kesiapsiagaan serta peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk Kabupaten Bantul.

f. Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul, pemetaan lokasi tempat evakuasi sudah dilakukan, namun memang belum tersedia bangunan khusus untuk tempat evakuasi tersebut meskipun papan petunjuk menuju tempat evakuasi sudah dipasang (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan terkait peraturan tersebut, bahwa BNPB telah memiliki pedoman untuk tempat evakuasi serta jalur evakuasi (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Sedangkan berdasarkan wawancara dengan PLT

Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul, dijelaskan bahwa untuk menentukan lokasi tempat evakuasi atau gedung atau bangunan tempat evakuasi harus disesuaikan dengan RTRW yang sudah ada (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana menjelaskan, ketika terjadi bencana maka akan diadakan koordinasi lintas sektor untuk menentukan tempat evakuasi mana yang digunakan berdasarkan tempat yang paling dekat dan lengkap fasilitasnya (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa instansi tersebut, diketahui bahwa penentuan tempat evakuasi menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh BNPB, namun untuk di wilayah Parangtritis memang tidak ada peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung tempat evakuasi dikarenakan di wilayah ini belum terdapat gedung atau bangunan untuk evakuasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua FPRB Paris Tangguh. Beliau mengatakan bahwa bangunan yang digunakan untuk tempat evakuasi merupakan bangunan yang sudah ada sebelumnya seperti bangunan di Balai Desa atau Kantor Kelurahan Parangtritis, sehingga tidak ada peraturan untuk pemeliharaan gedung tempat evakuasi (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

g. Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan

Ketika diberikan pertanyaan terkait peraturan pemenuhan kebutuhan dasar, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjawab bahwa Satpol PP membantu dalam distribusi, namun tidak memiliki peraturan tertulis (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Selanjutnya, Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan memiliki Tim Kaji Cepat, Bidang Farmasi yang

menyediakan obat, Bidang Umum yang bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana, serta Bidang SDM yang bertugas untuk menyediakan tenaga yang akan dikirim ke lapangan (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki Kampung Siaga Bencana (KSB). Seandainya terjadi bencana, maka KSB yang terdekat akan mendukung logistik yang dibutuhkan. KSB yang didirikan juga mewakili daerah-daerah rawan bencana (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi tugas dari Seksi Logistik (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal ini sejalan dengan adanya dokumen berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 yang membahas terkait tugas, fungsi, serta tata kerja BPBD Kabupaten Bantul dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 yang membahas terkait standardisasi data kebencanaan.

h. Terdapat peraturan terkait sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan

Berkaitan dengan peraturan mengenai sistem peringatan bencana, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul mengatakan bahwa terdapat peraturan tersebut dan sudah dipublikasikan di *website* milik BPBD Bantul (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Selanjutnya peneliti mendapatkan peraturan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan serta peringatan dini dalam penanggulangan bencana yaitu Perda Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2013. Di dalam perda tersebut menyebutkan bahwa penyampaian informasi harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan efektif. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui lembaga yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan

agar orang-orang yang berada di suatu tempat berbahaya dapat segera bertindak dan menyelamatkan diri.

4.2.1.3 Rencana Tanggap Darurat

Untuk mengetahui kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui parameter rencana tanggap darurat, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rencana tanggap darurat khususnya untuk bencana tsunami sebagai berikut.

a. Divisi pengelola bencana

Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar instansi yang diwawancarai memiliki divisi pengelola bencana. Kasi Kesiapsiagaan BPBD menjelaskan bahwa seluruh divisi di dalam BPBD memang berfungsi untuk pengelolaan bencana (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Kemudian, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa Bidang Perlindungan Masyarakat di Satpol PP bertujuan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 yang membahas terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul mengatakan bahwa di Bappeda sub bidang KPPSDA menjadi sub bidang yang berhubungan dengan kebencanaan secara tidak langsung (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa terdapat Tim Kaji Cepat (TKC) yang bertugas untuk segera melakukan kajian di lokasi bencana berkaitan dengan obat dan tenaga medis yang dibutuhkan oleh korban, kemudian TKC akan berkoordinasi dengan bagian farmasi, bagian umum, dan bagian SDM (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI

Kabupaten Bantul menyebutkan beberapa bidang yang ada di PMI dan paling berhubungan dengan bencana, di antaranya adalah Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Relawan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana menjelaskan bahwa di Dinas Sosial memiliki Taruna Siaga Bencana atau disingkat sebagai Tagana. Tagana sendiri memiliki tingkatan mulai dari provinsi hingga tingkat kabupaten. Beliau juga menjelaskan bahwa seandainya provinsi ingin memberikan bantuan kebencanaan di Bantul, maka akan berkoordinasi dengan Tagana Bantul (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Tidak hanya ditingkat kabupaten, di tingkat kecamatan atau kapanewon dan kelurahan juga memiliki bidang yang berhubungan dengan kebencanaan. Hal ini diungkapkan oleh Kawat Sosial Kapanewon Kretek yang menjelaskan bahwa di Kapanewon Kretek terdapat Kawat Sosial dan Kawat Keamanan yang berhubungan dengan kebencanaan (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Kemudian di tingkat kelurahan, Lurah Parangtritis menjelaskan bahwa Kelurahan Parangtritis memiliki FPRB yang pendanaannya didukung menggunakan dana desa (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua FPRB Paris Tangguh yang mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang mengelola kebencanaan di tingkat kelurahan dan langsung terjun di masyarakat (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Sedangkan untuk di Dinas Pariwisata sendiri tidak terdapat divisi yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, seluruh instansi menjawab bahwa telah dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua FPRB Paris Tangguh yang mengatakan bahwa pembagian tugas ini ada dengan tujuan tidak adanya kebingungan terkait siapa berbuat apa dan tidak ada tumpang tindih perintah karena semua sudah memiliki perannya masing-masing (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Hal tersebut berlaku juga di Bappeda, PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa di Bappeda terdapat kendali operasi, BPBD termasuk ke dalam bidang Sarpras yang di dalamnya terdapat sub bidang KPPSDA (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa pembagian tugas di Satpol PP diatur dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020 yang membahas terkait Linmas yang menjadi bagian dari Satpol PP. selanjutnya di dalam Linmas terdapat regu keposkoan, regu dapur umum, dan regu operasi. beliau juga menjelaskan bahwa seandainya terjadi kecelakaan air maka komando akan berada di Satpol PP sedangkan jika terjadi bencana seperti tsunami maka komando akan berada di BPBD (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Selanjutnya, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul mengatakan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab sudah jelas dan semua bidang memiliki tupoksinya masing-masing (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Penjelasan BPBD sesuai dengan adanya dokumen berupa Perda No. 14 Tahun 2015 mengenai peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana dan Perbup No. 90 Tahun 2018 mengenai tugas, fungsi, serta tata kerja BPBD.

c. Tempat evakuasi untuk pengungsian

Ketika diberikan pertanyaan terkait tempat evakuasi untuk pengungsian, peneliti mengetahui bahwa sudah tersedia tempat-tempat evakuasi khususnya yang berada di dekat Pantai Parangtritis. Namun, peneliti juga mengetahui bahwa belum ada bangunan di tempat evakuasi yang berfungsi sebagai tempat pengungsian.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjawab bahwa di Pantai Parangtritis terdapat tempat evakuasi yang berlokasi di Bulak Mabul (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa terdapat tempat evakuasi yang ada di Bulak Mabul, di wilayah makam, dan di Kantor Kelurahan Parangtritis (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Lurah Parangtritis yang mengatakan bahwa di Pantai Parangtritis, Bulak Mabul adalah tempat evakuasi terdekat, kemudian ada Maulana Maghribi, dan Kantor Kelurahan Parangtritis (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Ketua FPRB Paris Tangguh juga mengatakan bahwa mereka telah menentukan titik-titik yang dijadikan sebagai tempat evakuasi di antaranya adalah Bulak Mabul, Makam Maulana Maghribi, kemudian Kantor Kelurahan. Beliau juga mengatakan bahwa Bulak Mabul merupakan tempat terdekat yang bisa diakses oleh warga dan wisatawan dari arah pantai. Namun beliau juga mengungkapkan bahwa Bulak Mabul tidak memiliki tempat khusus untuk pengungsian, sedangkan Makam Maulana Maghribi dan Kantor Kelurahan memiliki bangunan meski bukan bangunan khusus untuk evakuasi dan pengungsian. Beliau juga menjelaskan bahwa akses menuju tempat evakuasi di Makam Maulana Maghribi rusak dan sulit dijangkau untuk kendaraan roda empat (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Ketua RT 06 dan RT 05 juga menjelaskan bahwa tempat evakuasi terdapat di tempat

tinggi yang berada di perbukitan di dekat Pantai Parangtritis, selain itu juga terdapat Balai Desa sebagai tempat evakuasi. Ketua RT 06 juga menjelaskan bahwa di tempat evakuasi tersebut belum tersedia fasilitas tempat untuk mengungsi (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul yang menjelaskan bahwa Bulak Mabul menjadi tempat evakuasi untuk di wilayah Parangtritis. Beliau juga menjelaskan bahwa jarak dari pantai ke Bulak Mabul sekitar 2-3 km. Selain itu, di dekat Bulak Mabul juga terdapat tempat evakuasi lain seperti Syekh Bela-belu, namun yang paling dekat adalah Bulak Mabul. Beliau juga menjelaskan bahwa sebelumnya pernah diadakan lomba untuk mengetahui berapa menit yang dibutuhkan untuk lari dari pantai menuju Bulak Mabul. Saat itu pemenangnya adalah murid SMP (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang tidak terdapat bangunan khusus untuk tempat evakuasi maupun pengungsian seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4.5 Tempat Evakuasi Bulak Mabul

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tempat evakuasi di Bulak Mabul berupa bukit dan memang hanya terdapat jalanan yang bisa digunakan warga dan wisatawan untuk menghindari

gelombang tsunami. Hal ini dikarenakan posisinya yang cukup tinggi. Di Bulak Mabul tidak terdapat bangunan atau lapangan yang dapat menampung masyarakat lokal maupun wisatawan saat menyelamatkan diri dari bencana tsunami.



Gambar 4.6 Tempat Evakuasi Maulana Maghribi

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa akses jalan menuju tempat evakuasi di Makam Syeh Maulana Maghribi berupa tangga sehingga akan sulit untuk diakses oleh kendaraan.



Gambar 4.7 Tempat Evakuasi Kantor Kelurahan Parangtritis

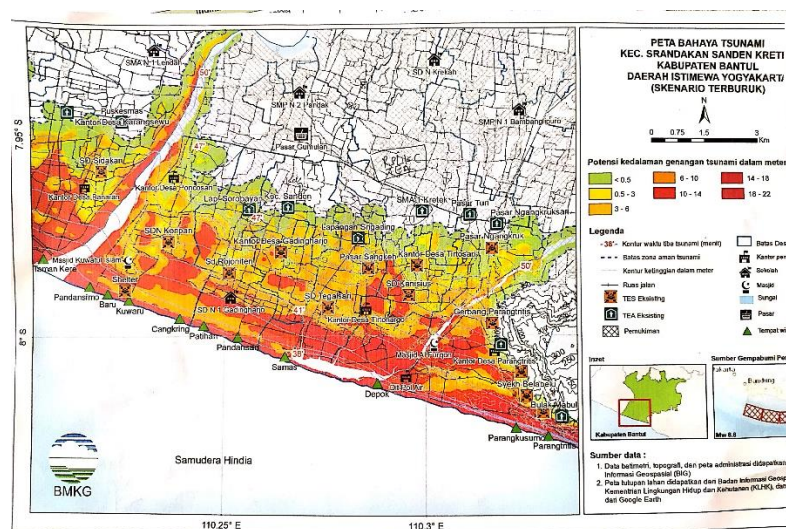
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Gambar 4.7 memperlihatkan Kantor Kelurahan yang menjadi tempat evakuasi dengan menggunakan bangunan yang sudah ada sebelumnya di kantor tersebut.

d. Peta bahaya tsunami dan peta evakuasi

Ketika diberikan pertanyaan terkait tersedianya peta bahaya tsunami dan peta evakuasi, diketahui bahwa Kabupaten Bantul memiliki peta bahaya dan peta evakuasi untuk bencana tsunami. Namun peta tersebut tidak dimiliki oleh semua pihak atau instansi yang diwawancarai oleh peneliti.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki peta bahaya tsunami maupun peta evakuasi, namun beliau mengatakan bahwa BPBD memiliki peta tersebut (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Begitupun dengan instansi lainnya yang mengaku mereka tidak memiliki peta tersebut. Selanjutnya, Staf Pusdalops BPBD Bantul menunjukkan peta bahaya dan peta evakuasi yang mereka miliki, peta tersebut merupakan peta terbaru yang memang belum dipublikasikan karena perlu dilakukan beberapa perbaikan (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).



Gambar 4.8 Peta Bahaya Tsunami dan Tempat Evakuasi Kabupaten Bantul

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Gambar di atas memperlihatkan peta bahaya tsunami dengan skenario terburuk sehingga jangkauan dampaknya lebih luas dibandingkan peta bahaya tsunami yang dipublikasikan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul sebelumnya (Gambar 1.1 Halaman 2). Selain BPBD, Kelurahan Parangtritis juga memiliki peta bahaya tsunami dan peta evakuasi, hal tersebut disampaikan oleh Lurah Parangtritis yang mengatakan bahwa peta bahaya dan peta evakuasi dapat dilihat di markas FPRB yang ada di Kantor Kelurahan Parangtritis (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua FPRB Paris Tangguh yang selanjutnya peneliti diantarkan ke markas mereka untuk melihat peta tersebut (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).



Gambar 4.9 Peta Jalur dan Tempat Evakuasi Desa Parangtritis
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Gambar di atas memperlihatkan peta jalur dan peta tempat evakuasi yang sudah ditentukan untuk kawasan Kelurahan Parangtritis.



Gambar 4.10 Peta Tingkat Ancaman Bencana Desa Parangtritis
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa warna merah menunjukkan ancaman terhadap bencana tsunami tinggi, kuning berarti ancaman terhadap tsunami sedang, dan hijau melambangkan ancaman tsunami rendah. Wilayah Pantai Parangtritis diketahui berada pada wilayah dengan warna merah yang berarti pantai tersebut memiliki ancaman tsunami yang tinggi. Selain peta jalur evakuasi dan peta ancaman bencana di atas, peneliti juga diperlihatkan peta risiko tsunami oleh Ketua FPRB Paris Tangguh.



Gambar 4.11 Peta Risiko Tsunami Desa Parangtritis

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan Parangtritis memiliki risiko tsunami yang bervariasi mulai dari risiko rendah yang dilambangkan dengan warna hijau, tingkat risiko sedang yang dilambangkan dengan warna kuning, hingga warna merah yang melambangkan tingkat risiko tsunami di wilayah tersebut tinggi. Pantai Parangtritis berada di wilayah yang berwarna merah, sehingga memiliki risiko tinggi.

e. Rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi

Ketika peneliti melakukan observasi di area Pantai Parangtritis, peneliti melihat terdapat banyak rambu-rambu tanda bahaya yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Rambu-rambu tanda bahaya tersebut ditujukan untuk wisatawan dengan harapan agar

dapat mencegah terjadinya kecelakaan air yang tidak diinginkan bagi wisatawan.



Gambar 4.12 Rambu Tanda Bahaya untuk Wisatawan Pantai Parangtritis

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa rambu-rambu tersebut berisi himbauan untuk menjaga kebersihan, larangan berjalan, tidak mandi di laut dikarenakan ombak tinggi, adanya ubur-ubur beracun yang ada di sekitar pantai, serta himbauan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yaitu untuk memakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa pihak Dinas Pariwisata memang membuat rambu-rambu tanda bahaya tersebut. Namun untuk rambu evakuasi biasanya dibuat oleh pihak BPBD (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa rambu tanda bahaya sudah ditempatkan di sekitar pantai (Wawancara

Pribadi, 8 November 2021). Ketua RT 06 juga mengatakan bahwa jalur evakuasi sudah ada di pinggir pantai dan di pinggir jalan sebelum masuk ke area Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Kawat Sosial Kapanewon Kretek yang mengungkapkan bahwa rambu-rambu sudah ditempatkan di sekitar pantai dan mudah terlihat dari jalan (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Selanjutnya, Lurah Parangtritis menjelaskan bahwa rambu-rambu jalur evakuasi dibuat pada tahun 2018 (Wawancara Pribadi, 19 November 2021)

Menurut Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul, jumlah dan penempatan rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi sudah cukup, hanya saja kurang terawat (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Sejalan dengan pernyataan pihak PMI, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul juga mengatakan bahwa sudah tersedia rambu untuk jalur evakuasi, namun menurut beliau banyak rambu yang kondisinya sudah kurang baik (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa rambu tanda bahaya diperuntukan bagi wisatawan. Selain itu menurut beliau meskipun rambu jalur evakuasi sudah tersedia, jumlahnya masih kurang banyak dan hanya ada di beberapa titik saja (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Ketua RT 05 sependapat dengan pihak Satpol PP, beliau mengatakan bahwa rambu-rambu tempat evakuasi, namun lokasinya kurang terlihat dan jumlahnya masih terlalu sedikit (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang sudah terdapat rambu-rambu jalur evakuasi di beberapa titik seperti berikut:



Gambar 4.13 Rambu Jalur Evakuasi Tsunami

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang jumlah rambu jalur evakuasi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan rambu tanda bahaya, selain itu beberapa rambu ditempatkan di lokasi yang kurang terlihat oleh wisatawan, namun kondisi rambu-rambu yang terdapat di area Pantai Parangtritis masih sangat baik.

f. Rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan

Menurut PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul, kebencanaan termasuk ke dalam standar pelayanan minimal, sehingga sosialisasi memang harus dilakukan kepada masyarakat di sekitar wilayah yang rawan terhadap bencana (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa pihaknya belum memiliki rencana

tersebut, kecuali jika BPBD melibatkan Dinas Pariwisata untuk mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat lokal dan wisatawan (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa Dinas Sosial memiliki rencana sosialisasi di Kampung Siaga Bencana. Menurut beliau, wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana akan menjadi prioritas BPBD untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan bencana (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa untuk melakukan sosialisasi terkait peta, tempat, maupun rute evakuasi tsunami kepada wisatawan sangat sulit karena sifat wisatawan yang datang dan pergi di lokasi wisata. Beliau mengatakan bahwa jika ada kegiatan ekspedisi tsunami, maka dapat melibatkan wisatawan. Namun kegiatan tersebut jarang diadakan dan sulit untuk dijadwalkan secara umum. Namun beliau mengatakan bahwa masyarakat setempat sudah mengetahui rambu-rambu tersebut, sehingga masyarakat paham harus menyelamatkan diri ke arah mana seandainya terjadi tsunami (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul yang mengungkapkan bahwa masyarakat lokal sudah diberikan sosialisasi, namun beliau merasa kesulitan untuk memberikan sosialisasi kepada wisatawan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan wisatawan selalu berganti-ganti setiap harinya. Sehingga menurut beliau untuk menginformasikan wisatawan dapat menggunakan rambu-rambu tanda bahaya dan rambu tempat evakuasi (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Kawat Sosial Kapanewon Kretek, Lurah Parangtritis mengungkapkan bahwa sosialisasi berkaitan dengan rute evakuasi diberikan pada masyarakat lokal ketika diadakan

sosialisasi atau pelatihan yang mengundang masyarakat. Sedangkan untuk wisatawan, mereka beranggapan bahwa wisatawan secara tidak langsung akan tahu tempat evakuasi tersebut tanpa harus diberikan sosialisasi secara khusus (Wawancara Pribadi, 15; 19 November 2021). Ketua FPRB Paris Tangguh secara lebih rinci menjelaskan bahwa sudah pernah dilaksanakan simulasi terkait jarak tempuh dari pantai menuju tempat evakuasi di Kantor Kelurahan Parangtritis, saat itu waktu tempuh yang didapatkan sekitar 20 menit. Karena terlalu jauh, maka masyarakat diarahkan untuk berlari ke Bulak Mabul jika terjadi tsunami. Beliau juga menjelaskan bahwa mereka memberikan informasi terkait laka air melalui pengeras suara di Pos SAR, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyiarkan juga informasi terkait jalur evakuasi kepada wisatawan meskipun rambu jalur evakuasi sudah terlihat jelas dari jalan (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Sedangkan menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, karena jumlah rambu evakuasi tidak banyak dan hanya ditempatkan di beberapa lokasi, menyebabkan sosialisasi ke masyarakat dan wisatawan belum bisa optimal (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Saat peneliti mewawancarai Ketua RT 05, beliau menjelaskan bahwa beliau selaku Ketua RT tidak merasa dilibatkan terkait pemasangan rambu-rambu tempat evakuasi (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Sedangkan Ketua RT 06 mengaku bahwa selama tiga tahun beliau tinggal di Kelurahan Parangtritis, tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait rute evakuasi (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

g. Posko bencana dan protap pelaksanaan

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul mengatakan bahwa posko dibentuk jika bencana sudah terjadi. Beliau juga mengatakan bahwa seandainya

tsunami terjadi di Pantai Parangtritis, maka Kantor Kapanewon Kretek akan menjadi posko darurat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengatakan bahwa di Pantai Parangtritis terdapat Posko Terpadu (Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di sekitar Pantai Parangtritis.



Gambar 4.14 Posko Terpadu Pariwisata di Kawasan Pantai Parangtritis

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Posko Terpadu tersebut berada tidak jauh dari Pos Satpol PP dan Posko SAR yang ada di Pantai Parangtritis. Posko Terpadu didirikan dengan tujuan untuk dapat mengedukasi wisatawan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, serta keamanan. Posko ini juga bertugas sebagai pemantau ketersediaan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, tempat sampah, maupun rambu-rambu, kemudian bertugas untuk melakukan patroli, pelayanan penanganan kecelakaan baik di darat ataupun di laut, memberikan pelayanan terkait informasi dan pengaduan wisatawan, serta menjadi mediator jika terjadi masalah antara pelaku wisata dengan wisatawan di Pantai Parangtritis (Dinas Pariwisata Kab. Bantul, 2020).

Menurut Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, ketika terjadi bencana maka biasanya TNI/Polri

yang mendirikan posko. Kemudian di dalam posko tersebut akan terdiri dari beberapa *cluster*, di antaranya adalah *cluster* kesehatan, *cluster* sosial, dan *cluster* layanan air bersih (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Selain itu, Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul mengatakan bahwa PMI Kabupaten Bantul sudah memiliki posko yang aktif 24 jam (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

h. Nomor *hotline* informasi bencana

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa di Posko Terpadu Parangtritis disediakan nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Menurut Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul, di Kabupaten Bantul sendiri telah terdapat *call center* yang ada di Pusdalops. Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat menghubungi *call center* tersebut, kemudian pihak BPBD akan menghubungi jejaring terkait seperti PMI, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan sebagainya (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Hal ini sejalan dengan ungkapan Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang mengatakan bahwa terdapat *call center* 112 untuk tanggap darurat. Selain untuk kebencanaan, *call center* tersebut juga dapat digunakan untuk melaporkan peristiwa seperti adanya orang yang mengamuk, kebakaran, dan sebagainya (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan Staf Pusdalops BPBD Bantul, diketahui bahwa terdapat nomor *hotline* untuk informasi bencana. Untuk panggilan darurat bisa menghubungi ke 112 atau melalui aplikasi WhatsApp di nomor 02746462100 (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Ketua RT 05 juga mengatakan bahwa sudah terdapat nomor *hotline* informasi bencana, namun beliau sendiri tidak menyimpan nomor tersebut. Beliau mengatakan kalau anggota FPRB memiliki nomor tersebut, namun warga tidak (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Sedangkan Ketua RT 06 mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya nomor *hotline* bencana (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

i. Rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan)

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul menyampaikan bahwa terkait rencana pertolongan pertama korban merupakan tugas dari Seksi Tanggap Darurat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Secara lebih rinci Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa, PMI memiliki posko 24 jam yang terdiri dari 1 *driver*, 2 opeator posko, 1 perawat tenaga medis, serta terdapat beberapa anggota piket relawan. Selain untuk antisipasi bencana, hal tersebut juga diperuntukan jika ada kecelakaan lalu lintas, orang sakit yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, maupun keadaan darurat lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa posko tersebut merupakan gabungan dari bidang penanggulangan bencana dan bidang pelayanan kesehatan sosial masyarakat (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

j. Rencana penyelamatan korban bencana dan transportasi/sistem ambulan

Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan terkait rencana penyelamatan korban bencana yang menggunakan aturan Triase, yaitu memprioritaskan korban yang memiliki tingkat keselamatan hidup lebih tinggi. Beliau juga menjelaskan bahwa ketika terjadi bencana, maka akan dikirim tim asesmen terlebih dahulu. Terdapat beberapa kali asesmen, yaitu

asesmen cepat dan asesmen lanjutan. Setelah itu, Tim Asesmen akan memetakan kebutuhan dan tingkat kerusakan untuk selanjutnya dilaporkan ke posko. Kemudian posko akan mengirimkan Tim Evakuasi. Ketika berada di lokasi bencana, maka Tim Evakuasi akan melakukan Triase. Setelah dievakuasi, maka korban akan dibawa ke pengungsian. Jika di pengungsian tidak tersedia personil yang mampu melakukan pertolongan, maka korban akan segera dibawa ke rumah sakit yang dirujuk (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

k. Unit SAR dan protap

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa di Pantai Parangtritis terdapat Gedung SAR. Beliau juga menjelaskan bahwa SAR berada di bawah Satpol PP. Menurut penjelasan beliau, orang-orang yang terbiasa di sekitar pantai dan sudah paham dengan kondisi pantai direkrut untuk menjadi Tim SAR di bawah Satpol PP (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa BPBD menjalin relasi dengan SAR. Beliau juga menjelaskan bahwa, jika terjadi gempa Tim SAR bertugas untuk ke tempat evakuasi yang lebih tinggi untuk melihat pasang surutnya air laut dan jika terdapat tanda-tanda gelombang tsunami, Tim SAR akan langsung menginformasikan ke Pusdalops (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).



Gambar 4.15 Posko SAR

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Pantai Parangtritis memang telah terdapat gedung Posko SAR seperti yang diperlihatkan gambar di atas. Posko SAR memiliki bangunan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan di sekitarnya, sehingga terlihat jelas baik dari pantai maupun dari jalan yang terdapat di pinggir pantai.

l. Data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa, jika terjadi bencana maka Puskesmas yang paling dekat dengan lokasi bencana akan mengantar obat darurat (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Pengurus Logistik Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengatakan bahwa data alokasi tersebut dipisahkan berdasarkan sumbernya baik dari APBN maupun APBD (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

m. Daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar

Pengurus Logistik Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa seluruh barang logistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial memang disimpan di gudang yang terdapat di Dinas Sosial. beliau

juga mengatakan bahwa data tersebut diperbaharui setiap akhir bulan (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).



Gambar 4.16 Gudang Logistik Dinas Sosial dan Rekapitulasi Barang

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Gambar di atas memperlihatkan kondisi gudang logistik yang terdapat di Dinas Sosial Kab. Bantul. Gudang tersebut berisikan berbagai macam kebutuhan mulai dari makanan, kebutuhan dapur, sampai peralatan lainnya. Selain itu terdapat data rekapitulasi barang yang diperbaharui setiap akhir bulan.

n. Prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat

Pengurus Logistik Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa logistik yang terdapat di Gudang Dinsos berasal dari Kementerian Sosial. barang-barang logistik tersebut selalu diberikan meskipun tidak dalam keadaan bencana, hal ini bertujuan agar saat terjadi bencana tidak menunggu waktu lama untuk pengadaan logistik yang dibutuhkan. Beliau juga menyampaikan bahwa 3 bulan sebelum kadaluwarsa, logistik berupa makanan akan segera disalurkan ke pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan atau kegiatan sosial lainnya (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

o. Prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat

Pengurus Logistik Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjelaskan terkait prosedur untuk distribusi logistik. Beliau mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan asesmen di

lokasi kejadian. Asesmen tersebut terdiri dari data kejadian, nama penerima, alamat penerima, tanggal, jam, jenis kerusakan, kronologi, dan foto dokumentasi. Selanjutnya hasil asesmen tersebut dikirim ke posko untuk dicek layak atau tidaknya. Jika layak maka logistik akan langsung dikirim ke lokasi bencana (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

p. Peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa pihak BPBD memiliki peralatan beserta data yang berkaitan dengan jumlah peralatan berdasarkan kondisinya (Lampiran 8) (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Lampiran 8 memperlihatkan data kondisi peralatan yang dimiliki oleh BPBD Bantul. Kebanyakan dari peralatan yang dimiliki oleh BPBD berada pada kondisi layak, namun masih terdapat beberapa peralatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah minimal seharusnya. Selain BPBD, PMI Bantul juga memiliki peralatan untuk penanggulangan bencana yang disimpan di Markas PMI Bantul (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Selanjutnya Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Bersama Wakil Koordinator Tagana menjelaskan bahwa peralatan sudah tersedia di Gudang Dinsos. Namun mereka mengaku bahwa mereka tidak memiliki MCK (Lampiran 9) (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Berkaitan dengan ketersediaan MCK Portabel, Ketua RT 05 juga menjelaskan bahwa ketika terjadi tsunami 2006, masyarakat yang mengungsi akan pergi ke rumah warga sekitar pengungsian untuk keperluan MCK (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

q. Latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)

Menurut Ketua RT 05, latihan ataupun simulasi bencana tidak melibatkan masyarakat. Beliau selaku Ketua RT juga tidak merasa mendapatkan perintah atau undangan untuk mengikuti simulasi yang

diadakan oleh BPBD pada Bulan Oktober 2021. Beliau menyampaikan bahwa hanya anggota FPRB dan Tim SAR saja yang mengikuti simulasi tersebut. Namun beliau mengatakan bahwa pernah ada sosialisasi yang melibatkan warga, namun bukan simulasi atau pelatihan (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Ketua RT 06 juga mengatakan bahwa beliau mendengar suara sirine ketika diadakan gladi tsunami pada Bulan Oktober 2021 lalu. Namun tidak melibatkan masyarakat sekitar. Beliau juga mengungkapkan bahwa sirine yang ada di masjid-masjid digunakan sebagai peringatan bencana dan dibunyikan sekitar satu bulan sekali (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Berkaitan dengan sirine tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul. beliau mengatakan bahwa sirine akan dibunyikan setiap 35 hari untuk mengecek apakah sirine tersebut berfungsi atau tidak, sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait fungsi sirine yang dibunyikan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Berkaitan dengan gladi tsunami, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa telah dilakukan gladi untuk tsunami dan gladi tersebut dibatasi pesertanya karena kondisi pandemi COVID-19. Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat diwakili oleh FPRB. Namun gladi yang diadakan pada tahun 2019 pernah melibatkan masyarakat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

4.2.1.4 Sistem Peringatan Bencana

Untuk mengetahui kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui parameter sistem peringatan bencana, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sistem peringatan bencana khususnya untuk bencana tsunami sebagai berikut.

a. Pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa belum adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Secara lebih rinci Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal dikarenakan masyarakat belum pernah mengalami kejadian tsunami di Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Wakil Koordinator Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bantul lebih lanjut menjelaskan bahwa di sekitar kawasan Pantai Parangtritis belum pernah mengalami kejadian tsunami yang hebat, jadi sampai dengan 2021 belum adanya sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal, alat yang tersedia masih berupa sirine dari BPBD (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Lurah Parangtritis juga mengatakan bahwa tidak adanya sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal dan pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal dikarenakan belum pernah terjadi tsunami besar. Jadi peringatan bencana yang secara tradisional belum tumbuh dalam kehidupan masyarakat (Wawancara Pribadi, 19 November 2021).

b. Teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa sudah tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sistem peringatan bencana merupakan bantuan dari Jepang. Alat ini berbeda dengan Buoy, dan diletakkan di daratan, posisinya tepat di samping pantai. Kegunaan alat ini sebagai radar atau

pendeteksi adanya gempa yang berpotensi tsunami sebelum tsunami tersebut sampai ke daratan Pantai (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Hal yang sama juga dibenarkan oleh Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul dan Ketua RT 06, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa terdapat sistem peringatan bencana di sekitar pantai yang berguna untuk mendeteksi tsunami (Wawancara Pribadi, 14 dan 15 November 2021).



Gambar 4.17 Radar Tsunami

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2021)

Pernyataan narasumber-narasumber terkait alat pendeteksi tsunami sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa terdapat teknologi sebagai sistem peringatan bencana tsunami yang berada di dekat pantai.

Selain itu, tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaannya dalam bentuk lainnya, seperti yang

dijelaskan oleh PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul bahwa terdapat sirine yang terpasang di masjid (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Pernyataan ini dibenarkan oleh Kawat Sosial dan Panewu Anom Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa penggunaan masjid sebagai pemberi peringatan ke warga jika terjadi tsunami (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

c. Instalasi peralatan untuk peringatan bencana

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul menyatakan secara jelas bahwa terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana, yang instalasinya dibantu oleh BMKG (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Senada dengan hal tersebut, Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul membenarkan bahwa terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana, pertama letaknya di pantai dan di Gedung SAR Parangtritis, yang kedua penggunaan toa di masjid sebagai peralatan untuk peringatan bencana (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

d. Prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Staf Pusdalops BPBD Bantul menyatakan bahwa terdapat prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dibantu oleh BMKG (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

e. Sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengatakan bahwa secara umum penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dilakukan oleh BPBD, melalui TIM SAR di pantai. SAR ini lah yang akan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sekitar pantai jika

terdapat kejadian aneh di Pantai, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera evakuasi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Lebih lanjut Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa jika terjadi gempa, maka akan ada informasi dari BMKG ke Pusdalops BPBD, kemudian Pusdalops akan menyiarkan informasi tersebut melalui media lainnya seperti *handphone*, WhatsApp, telepon, HT dan sebagainya. Selain itu terdapat sirine di sepanjang pantai, ketika sirine dibunyikan, masyarakat sudah memahami bahwa mereka harus evakuasi ke tempat yang lebih aman dan tempat yang lebih tinggi. Kemudian Staf Pusdalops BPBD menjelaskan kepada peneliti bahwa informasi pertama terkait gempa dan tsunami berasal dari BMKG. Setelah ada gempa yang dirasakan masyarakat dan itu dirasakan juga di Kabupaten Bantul, Pusdalops BPBD menunggu informasi resmi dari BMKG, informasi akan diterima selang waktu sekitar 3-5 menit. Selain itu juga terdapat sistem peingatan dini lainnya. Seperti *Bantul Integrated Siren System* (BISS) yang dirintis oleh Pak Ayub dari Wonokromo dan penggunaan masjid dan komunikasi radio yang di uji coba setiap tanggal 26. Jika lancar dan tidak ada gangguan, penyebaran informasi itu bisa cepat. Gangguannya yang dimaksudkan disini seperti mati listrik ataupun alat yang dicuri. jika listrik mati, alat komunikasi yang digunakan adalah radio komunikasi (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kawat Sosial dan Panewu Anom Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang mengatakan bahwa terdapat pengeras suara di pantai, yang digunakan sebagai alat menyebarkan informasi terkait bencana (Wawancara Pribadi, 10 dan 15 November 2021).

Lurah Parangtritis Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa jika sirine berbunyi, maka warga akan langsung mengerti bahwa terdapat

bencana dan mereka juga sudah tahu di mana tempat evakuasinya. Selain itu, terdapat Tim FPRB dan Tim SAR di dekat pantai (19 November 2021). Ketua RT 05 dan RT 06, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul membenarkan bahwa terdapat tim SAR dan FPRB yang siaga memantau kejadian di sekitar pantai. Selain sirine, biasanya jika ada gempa besar, warga tetap tenang dan mengikuti instruksi yang diberikan, seperti evakuasi dengan hanya membawa surat-surat penting dan berharga (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

f. Pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengatakan bahwa terdapat pelatihan kebencanaan yang diikuti oleh stafnya. Pelatihan tersebut difokuskan pada kemampuan penyelamatan seperti *snorkeling* dan sebagainya. Jadi jika terjadi bencana atau laka air, tim dari Satpol PP sudah siap untuk melakukan penyelamatan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul bahwa dulu memang tidak ada pelatihan, karena tsunami belum menjadi *issue* serius di Kabupaten Bantul. Namun setelah ada kajian tentang potensi tsunami di daerah ini, maka pelatihan juga diberikan kepada staf BPBD (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan lebih rinci bahwa standar untuk menjadi anggota PMI, baik itu relawan maupun staf diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar atau orientasi dasar. Orientasi dasar mencakup pengetahuan terkait kebencanaan dan pertolongan pertama. Langkah selanjutnya adalah pemilihan maksimal 2 jenis spesialisasi khusus di kebencanaan, seperti halnya masalah logistik dan pertolongan pertama. Spesialisasi lainnya seperti masalah mitigasi, masalah

asesmen, masalah dapur umum, pertolongan pertama, dan perawatan keluarga (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana, dan Wakil Koordinator Tagana, serta Pengurus Logistik Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjelaskan kepada peneliti bahwa terdapat pelatihan kebencanaan dari BPBD, BNPB, kementerian lainnya terkait psiko sosial (Wawancara Pribadi, 16 dan 19 November 2021).

Ketua FPRB Paris Tangguh, Kabupaten Bantul menjelaskan lebih rinci bahwa jumlah anggotanya saat ini mencapai 103 orang, terdapat 47 orang anggota baru, jadi mereka baru mendapat pelatihan pemadam kebakaran dan covid jenazah. Sedangkan anggota lama, semua sudah dapat pelatihan lengkap, termasuk pelatihan apa yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

Hal ini dibenarkan oleh Kawat Sosial dan Panewu Anom Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan Lurah Parangtritis Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul menyatakan bahwa untuk seluruh pengurus di kelurahan sudah mendapatkan pelatihan, baik dari BPBD, maupun dari FPRB (Wawancara Pribadi, 15 dan 19 November 2021).

4.2.1.5 Mobilisasi Sumber Daya

Untuk mengetahui kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui parameter mobilisasi sumber daya, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Bantul sebagai berikut.

a. Kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa terdapat sinergitas antar

instansi untuk sama-sama menangani permasalahan akibat bencana (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa sudah terdapat kesepakatan antar instansi pemerintah, beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan alat, masing-masing instansi akan menggunakan alat milik mereka sendiri dan bertanggung jawab terhadap alat masing-masing namun meski demikian antar instansi tetap saling mendukung satu sama lain (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos yang mengatakan bahwa terdapat kesepakatan antara berbagai instansi terkait siapa berbuat apa (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa terdapat kesepakatan antar instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya dengan BPBD sebagai komando (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bantul yang mengatakan bahwa jika terjadi bencana maka Bupati akan menunjuk pelaksana untuk penanganan bencana, dalam hal ini adalah BPBD. Selanjutnya BPBD akan mengepalai dan mengkoordinir instansi lainnya (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

b. Kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat, namun kesepakatan tersebut tidak tertulis. Beliau mengatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui harus mengikuti arahan siapa jika terjadi bencana (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Seksi Objek

Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa Ketua RT maupun Lurah dapat memberitahu masyarakat jika terjadi bencana karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui rambu-rambu evakuasi sehingga jika terjadi bencana mereka sudah mengerti. Namun beliau mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan dengan wisatawan karena mereka hanya sesaat di lokasi pantai (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Ketua RT 05 dan Ketua RT 06 mengatakan bahwa FPRB dan Tim SAR memberikan peringatan yang selanjutnya akan diikuti oleh masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat sudah percaya dengan FPRB dan Tim SAR yang ada di kawasan Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

c. Mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)

Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa kelembagaan PMI mulai dari pusat hingga tingkat kabupaten. Ketika terjadi bencana, akan selalu ada NGO yang datang. Jika NGO tersebut datang dari tingkat nasional maka mereka akan berkoordinasi dengan PMI Pusat sehingga PMI Kabupaten akan bertindak sebagai penerima dan penyalur bantuan. Pihak PMI juga akan menyesuaikan keinginan NGO untuk menyalurkan bantuan kemana. Beliau juga menjelaskan terkait mekanisme untuk mengelola relawan dimana terdapat relawan mulai dari tingkat sekolah yaitu PMR, tingkat usia 17-35 tahun yaitu KSR atau sukarela, untuk usia di atas 35 tahun dan memiliki keahlian maka akan ditempatkan sebagai TSR. Mereka yang TSR akan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing

seperti driver, dokter, perawat, dan sebagainya, kemudian yang terakhir adalah relawan donor darah sukarela yang mampu melakukan donor darah secara rutin setiap 2 bulan sekali (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Selanjutnya Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos mengatakan bahwa BPBD DIY akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten, lalu BPBD kabupaten akan berkoordinasi dengan Dinsos maupun pihak setempat (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa ada MOU berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dari pihak luar (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

d. Komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando

Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos menjelaskan bahwa *call center* 112 sudah terdiri dari semua OPD dan pihak ketiga yang menangani bencana, akan ada komando sesuai dengan jenis keadaan daruratnya (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Selanjutnya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Kawat Sosial Kapanewon Kretek, Lurah Parangtritis mengatakan bahwa jika terjadi bencana maka komando akan berada di BPBD (Wawancara Pribadi, 8; 15; 15; 19 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa Bupati akan melimpahkan ke Dandim atau Kapolsek untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pusdalops dengan tetap saling berkoordinasi antara Pusdalops, Dandim, dan Kapolsek. Namun beliau juga mengatakan bahwa komando utama tetap ada di Pusdalops untuk menghindari tumpang tindih (Wawancara Pribadi, 3 November 2021)

e. Protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah

Staf Pusdalops BPBD Bantul menjelaskan bahwa informasi terkait bencana dari BMKG lalu diterima Pusdalops dan nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi lainnya (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul mengatakan bahwa komunikasi antar instansi menggunakan telepon genggam dan HT (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan pihak PMI, Kawat Sosial Kapanewon Kretek, Lurah Parangtritis yang mengatakan bahwa terdapat grup WhatsApp yang terdiri dari berbagai instansi. Selain itu terdapat HT yang digunakan hanya dalam penanganan bencana saja (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Kemudian Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos menjelaskan bahwa Tagana memiliki format untuk asesmen sebagai acuan kebutuhan yang diperlukan dan selanjutnya akan dikirimkan kebutuhan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah terkoordinasi dengan tim relawan, FPRB, dan sebagainya (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

f. Protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)

Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos menjelaskan bahwa terdapat komunikasi berjenjang mulai dari instansi hingga publik (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Staf Pusdalops menjelaskan bahwa setiap bulan dibunyikan sirine yang ada di masjid-masjid sepanjang pantai dengan tujuan agar masyarakat mengerti fungsi dari sirine tersebut (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

g. Jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana

Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinsos menjelaskan bahwa Bappeda akan mengumpulkan para investor, NGO, CSR yang akan difokuskan untuk penanganan darurat (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Selanjutnya Staf Pusdalops menjelaskan bahwa Bupati akan mengadakan rapat terkait kebutuhan untuk menanggulangi bencana yang terjadi dan sudah tersedia jaringan kerja dengan pihak swasta maupun NGO (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Menurut Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kab. Bantul, relawan maupun NGO harus terdaftar di posko untuk dicek administrasi maupun keahliannya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

h. Personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang pelatihan atau seminar yang diikuti oleh staf, maka seluruh narasumber yang diwawancarai mengaku kalau sudah terdapat personil yang terlatih dalam kebencanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP mengungkapkan bahwa seluruh staf sudah diberikan pelatihan terkait kemampuan penyelamatan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Begitupun dengan PMI yang mengaku bahwa personilnya sudah terlatih dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana ataupun kondisi darurat lainnya (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Kasi Kesiapsiagaan BPBD juga mengatakan bahwa personil BPBD telah dilatih tidak hanya untuk tsunami, namun untuk semua jenis bencana termasuk COVID-19. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa BPBD juga memberikan pelatihan kepada FPRB sebagai wakil dari BPBD yang terjun langsung dikalangan

masyarakat (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Ketua FPRB Paris Tangguh membenarkan bahwa dalam FPRB sudah ada personil terlatih karena peran mereka sebagai garda terdepan (Wawancara Pribadi, 22 November 2021)

i. Teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana

Ketika diberikan pertanyaan terkait jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif, seluruh instansi mengatakan bahwa mereka tidak membuat dan tidak merancang sejauh itu. Karena selama ini bantuan cepat masuk ke lokasi bencana. Namun ketua FPRB menyebutkan bahwa secara tradisional bahan pangan alternatif bisa menggunakan ketela atau daun pepaya yang banyak ditemukan di sekitar tempat evakuasi (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

j. Bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul mengatakan bahwa BPBD akan memberikan pelatihan kepada FPRB atau desa yang meminta pelatihan dari BPBD (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Ketua FPRB menjelaskan bahwa untuk memberikan sosialisasi kebencanaan biasanya mereka akan mengundang perwakilan dari setiap RT yang selanjutnya peserta diwajibkan untuk menyebarkan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Namun beliau juga mengatakan bahwa tidak semua RT yang diundang hadir dalam sosialisasi yang diadakan tersebut (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Ketua RT 05 mengaku bahwa sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh FPRB (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Namun Ketua RT 06 mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir belum ada pelatihan terkait kebencanaan ataupun khusus tsunami (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Wakil Koordinator Tagana menjelaskan bahwa, Tagana memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui komunitas, desa, atau RT. Selain itu mereka juga melakukan sosialisasi berbasis sekolah untuk memperkenalkan anak-anak tentang bencana sejak dini (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

k. Materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP mengaku bahwa belum ada materi atau bahan terkait kesiapsiagaan yang mudah diakses oleh warga maupun wisatawan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul yang mengatakan bahwa materi kesiapsiagaan masih berupa brosur yang diberikan kepada masyarakat saat sosialisasi atau pelatihan. Beliau juga mengatakan bahwa karena tsunami besar belum pernah terjadi sehingga tidak menjadi topik yang sering diangkat untuk kegiatan sosialisasi (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Pernyataan BPBD sejalan dengan Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul yang mengungkapkan bahwa BPBD memiliki brosur yang dibagikan ke masyarakat saat sosialisasi (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Wakil Koordinator Tagana juga mengakui bahwa mereka belum memiliki materi yang mudah diakses oleh masyarakat maupun wisatawan (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Ketua RT 05 yang mengatakan bahwa materi dan bahan terkait kesiapsiagaan tidak mudah diakses dan harus ke Balai Desa dulu untuk mendapatkannya (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Sedangkan Ketua RT 06 mengaku bahwa dirinya kurang *aware* dan tidak berusaha mencari tahu terkait materi tersebut (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

I. Sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, materi terkait kesiapsiagaan belum disosialisasikan ke semua kalangan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul mengatakan sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat namun tidak untuk wisatawan (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Selanjutnya, Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana juga mengatakan bahwa mereka sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat (Wawancara Pribadi, 16 November 2021). Sedangkan Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengaku bahwa pihaknya tidak memberikan sosialisasi terkait kesiapsiagaan, melainkan hanya menyampaikan terkait risiko laka air yang bisa terjadi di pantai (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

m. Informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP mengatakan bahwa informasi terkait bencana alam memang ada namun kurang lengkap (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Staf Pusdalops mengatakan bahwa sebelumnya mereka memiliki aplikasi dengan nama PASEBAN Bantul, namun sekarang sudah tidak bisa diakses lagi. Beliau juga mengatakan bahwa informasi bencana yang pernah terjadi selalu direkap, namun tidak untuk dipublikasikan (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Pernyataan di atas sejalan dengan Ketua RT 05 yang mengatakan bahwa pihak yang memiliki dokumen ini adalah BPBD, BMKG, Tim SAR, atau FPRB (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

n. Prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD menjelaskan bahwa terdapat anggaran yang diberikan oleh DPRD untuk keperluan 43 sosialisasi dan 15 pelatihan yang berkaitan dengan kebencanaan (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI mengatakan jika PMI tingkat kabupaten dan PMI provinsi harus menjalankan rencana strategis yang terdapat di PMI Pusat. Sehingga terdapat prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana untuk menjalankan visi misi tersebut termasuk tentang kebencanaan (Wawancara Pribadi, 15 November 2021).

Lurah Parangtritis menjelaskan bahwa yang mengalokasikan dan memobilisasi dana terkait kebencanaan adalah FPRB (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua FPRB mengatakan bahwa mereka sudah Menyusun AD/ART dan alokasi serta mobilisasi dana sudah termasuk ke dalamnya (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

o. Rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev

Ketua FPRB menyampaikan bahwa setiap tahun mereka diundang oleh BPBD untuk melakukan monev (Wawancara Pribadi, 22 November 2021). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD sendiri menjelaskan bahwa dilakukan monev dalam bentuk laporan namun tidak dijelaskan secara rinci dibandingkan saat evaluasi langsung (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa pihak Dinkes melakukan monev ke Puskesmas berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Monev tersebut dilakukan setiap tahun (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI juga menjelaskan bahwa PMI Pusat akan melakukan monev di PMI Provinsi, lalu PMI Provinsi akan melakukan monev di PMI Kabupaten

setiap akhir tahun (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan monev dari tingkat provinsi setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

4.2.2 Pemahaman Masyarakat dan Wisatawan Terkait Kesiapsiagaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat dalam hal ini pedagang dan wisatawan Pantai Parangtritis, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang dan juga wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis dengan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006) dengan modifikasi agar lebih sesuai.

4.2.3.1 Pengetahuan

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat dan wisatawan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan narasumber terkait bencana tsunami sebagai berikut.

a. Dampak bencana yang ditimbulkan

Ketika diberikan pertanyaan terkait dampak apa yang akan muncul jika terjadi tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis, baik masyarakat maupun wisatawan dapat menjawab dengan baik. MJ selaku pedagang mengatakan bahwa jika tsunami terjadi maka akan menimbulkan kerugian baik harta benda maupun nyawa (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS selaku wisatawan asal Jakarta menjelaskan bahwa tsunami dapat menyebabkan banyak korban jiwa, kerugian material, hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal bagi masyarakat sekitar pantai (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan penjelasan DW yang mengatakan bahwa tsunami mampu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di daerah pesisir pantai (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

b. Tipe-tipe, sumber, penyebab, dan tindakan penyelamatan

IS menjelaskan bahwa tanda-tanda tsunami adalah air yang tiba-tiba surut dan kemudian muncul gelombang besar ke arah daratan. IS juga menjelaskan bahwa tindakan penyelamatan diri yang harus dilakukan adalah dengan menjauhi pantai dan mencari tempat tinggi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Sedangkan MJ mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apa penyebab tsunami namun beliau mengerti kalau harus berlari ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut juga diungkapkan oleh DW yang mengatakan bahwa jika terjadi tsunami maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan mengevakuasikan diri ke tempat yang paling tinggi (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

c. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami

MJ mengaku bahwa dirinya tidak mengerti bagaimana kerentanannya, namun beliau mengerti jika terjadi tsunami maka yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Menurut IS kondisi masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis sangat rentan terhadap tsunami (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan DW yang mengatakan bahwa kerentanan masyarakat tinggi (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

d. Kondisi dan rencana fasilitas kritis

MJ kurang mengetahui bagaimana kondisi fasilitas kritis yang ada di sekitar wilayah Parangtritis, namun MJ mengetahui lokasi puskesmas terdekat (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Selanjutnya, seluruh wisatawan yang diberikan pertanyaan terkait fasilitas kritis mengaku bahwa mereka tidak mengetahui letak dan bagaimana kondisi fasilitas kritis.

4.2.3.2 Kebijakan

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait kebijakan kepada masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mereka terkait upaya Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan bencana melalui kebijakan maupun peraturan. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun wisatawan tidak mengerti kebijakan dan peraturan apa yang telah dibuat oleh Pemda Kab. Bantul.

a. Peraturan terkait organisasi pengelola bencana

Meskipun MJ setiap harinya berdagang dan tinggal di wilayah Pantai Parangtritis, beliau mengaku kalau tidak mengetahui apapun terkait peraturan-peraturan yang ada soal kebencanaan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS mengaku bahwa dirinya kurang paham terkait peraturan yang ada di Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal yang sama juga diungkapkan oleh DW yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun tentang kebijakan dan peraturan yang ada di Kab. Bantul (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

b. Peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi

MJ, IS, dan DW mengaku bahwa mereka tidak mengetahui peraturan terkait tempat evakuasi tsunami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

c. Peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat)

Berdasarkan hasil wawancara, MJ, IS, dan DW mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar ataupun logistik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

d. Peraturan terkait sistem peringatan bencana

Baik MJ, IS, maupun DW mengaku bahwa mereka tidak mengetahui peraturan apapun terkait sistem peringatan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

4.2.3.3 Rencana Tanggap Darurat

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat dan wisatawan mengetahui terkait rencana tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bantul sebagai berikut.

a. Organisasi pengelola bencana

MJ mengatakan bahwa organisasi pengelola bencana yang ia ketahui adalah SAR (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Menurut IS, organisasi pengelola bencana yang dirinya ketahui adalah BPBD dan BNPB (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Secara lebih lengkap, DW mengatakan bahwa organisasi pengelola bencana yang ia ketahui adalah BPBD Kab. Bantul yang bekerjasama dengan instansi lain di wilayah setempat serta masyarakat (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi

Menurut MJ, seharusnya sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab di tingkat Pemda, namun beliau mengaku tidak mengetahui bagaimana pembagian tugasnya (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS menjelaskan bahwa disetiap organisasi pasti memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut juga diungkapkan oleh DW bahwa setiap anggota organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pasti terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

c. Tempat evakuasi untuk pengungsian

MJ menjelaskan bahwa tempat evakuasi berada di Bulak Mabul yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 5 menit menggunakan motor (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Ketika mengunjungi Pantai Parangtritis, IS mengaku bahwa dirinya tidak tahu apakah terdapat tempat evakuasi tsunami atau tidak disekitar pantai (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Selaku wisatawan DW mengetahui harus pergi ke bukit yang ada di dekat Pantai Parangtritis jika terjadi tsunami, namun beliau mengaku tidak tahu jalur yang harus dilalui untuk menuju ke tempat evakuasi tersebut (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

d. Peta bahaya tsunami dan peta evakuasi

MJ mengaku bahwa ia tidak mengetahui terkait peta bahaya tsunami maupun evakuasi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS, dan DW selaku wisatawan juga mengaku bahwa mereka tidak mengetahui peta tsunami maupun peta evakuasi yang dibuat oleh Pemerintah Kab. Bantul.

e. Rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi

MJ menjelaskan bahwa sudah terdapat rambu tanda bahaya di pinggir pantai. Rambu tanda bahaya berisi tentang larangan mandi di pantai, sedangkan rambu evakuasi ditandai dengan warna hijau (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS mengaku bahwa ketika berkunjung di Pantai Parangtritis, beliau tidak memperhatikan terkait rambu-rambu tanda bahaya ataupun rambu jalur evakuasi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut juga diungkapkan oleh DW yang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rambu tanda bahaya maupun rambu jalur tsunami (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

f. Rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan

MJ mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi berkaitan dengan rute evakuasi, beliau mengatakan bahwa rambu-rambu tersebut sudah terpasang tanpa tahu kapan rambu tersebut dipasang (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS dan DW mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apapun terkait adanya rencana untuk mensosialisasikan peta atau rute evakuasi kepada wisatawan (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

g. Nomor *hotline* informasi bencana

Sebagai masyarakat yang tinggal dan berdagang di dekat pantai, MJ mengaku bahwa dirinya tidak memiliki dan tidak mengetahui nomor *hotline* bencana (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Selain MJ selaku masyarakat, IS dan DW tidak mengetahui berapa nomor *hotline* bencana yang ada di Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

h. Unit SAR

Ketika diberikan pertanyaan terkait ada atau tidaknya unit SAR, MJ mengatakan bahwa telah ada Tim SAR dan menunjuk arah tempat Posko SAR berada (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Menurut DW seharusnya terdapat unit SAR disekitar Pantai Parangtritis, namun beliau mengaku kalau tidak mengetahui letaknya (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Sedangkan IS mengaku dirinya tidak mengetahui kalau terdapat Posko SAR di sekitar Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

i. Peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)

MJ mengatakan bahwa perlengkapan seperti tenda itu sudah ada (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Namun sebagai wisatawan, IS dan DW mengaku tidak tahu terkait peralatan atau

perlengkapan keadaan darurat yang disediakan Pemkab Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

j. Latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)

MJ menceritakan bahwa MJ melihat kegiatan gladi tsunami yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, namun beliau hanya melihat dan tidak dilibatkan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Pantai Parangtritis, namun belum pernah melihat adanya latihan, simulasi, maupun gladi yang melibatkan wisatawan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Sedangkan DW mengaku tidak tahu karena baru pertama kali datang ke Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

4.2.3.4 Sistem Peringatan Bencana

Berkaitan dengan sistem peringatan bencana, peneliti memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis sebagai berikut.

a. Pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal

MJ mengatakan bahwa tidak ada pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS dan DW selaku wisatawan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui apakah terdapat pengakuan terhadap sistem peringatan bencana tradisional atau tidak (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

b. Teknologi sistem peringatan bencana

MJ menjelaskan bahwa terdapat alat yang diletakkan di dekat pantai, namun beliau mengaku kalau tidak mengetahui apa fungsi alat tersebut (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). IS selaku wisatawan menjelaskan bahwa terdapat Buoy yang mengapung di atas laut, menurut beliau alat ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengawasi perubahan tingkat air laut (Wawancara Pribadi, 8

November 2021). Sedangkan DW mengaku tidak tahu apakah terdapat teknologi sistem peringatan bencana di Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

c. Instalasi peralatan untuk peringatan bencana

Menurut MJ terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana karena terdapat alat-alat di dekat pantai (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Sedangkan IS dan DW mengaku tidak mengetahui apakah ada instalasi peralatan untuk peringatan bencana di sekitar pantai atau tidak (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

d. Sistem penyebaran peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan

MJ menjelaskan bahwa jika terjadi gempa, maka SAR akan memberikan informasi melalui pengeras suara kepada masyarakat dan wisatawan yang ada di wilayah Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Pernyataan MJ sejalan dengan pernyataan IS yang mengatakan bahwa penyebaran peringatan bencana tsunami menggunakan pengeras suara (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Sedangkan DW mengaku tidak tahu bagaimana cara penyebaran peringatan bencana di Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

4.2.3.5 Mobilisasi Sumber Daya

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat dan wisatawan yang ada di Pantai Parangtritis untuk mengetahui pemahaman masyarakat maupun wisatawan berkaitan dengan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terkait bencana tsunami.

a. Kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana

MJ mengatakan bahwa masyarakat hanya mengikuti arahan dari SAR. Namun seandainya masyarakat melihat air semakin naik ke

atas sedangkan SAR belum memberikan informasi apapun maka beliau akan langsung pergi ke Bulak Mabul (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Menurut DW, sudah terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat karena wilayah Pantai Parangtritis adalah wilayah yang cukup rawan terhadap bencana tsunami (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Sedangkan IS mengaku tidak mengetahui apakah terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

b. Komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)

MJ mengatakan bahwa beliau hanya percaya dengan informasi yang diberikan oleh SAR karena menurut beliau informasi SAR sudah pasti benar (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). DW juga mengungkapkan bahwa sudah terdapat komunikasi publik berkaitan dengan informasi keadaan darurat (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). IS mengaku bahwa dirinya kurang paham bagaimana komunikasi terkait informasi keadaan darurat di sekitar Pantai Parangtritis (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

c. Bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat

MJ mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan, beliau juga ragu apakah ada atau tidak (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

d. Materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan

Menurut DW, belum ada materi yang mudah diakses oleh wisatawan yang berasal dari Pemda Kab. Bantul. Beliau berpendapat mungkin karena baru sekali mengunjungi Pantai Parangtritis jadi tidak mengetahui di mana beliau bisa mendapatkan materi ataupun bahan terkait kesiapsiagaan (Wawancara Pribadi, 14

November 2021). Sedangkan MJ dan IS mengaku bahwa mereka tidak tahu apakah terdapat materi kesiapsiagaan yang dikeluarkan oleh Pemkab Bantul (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

e. sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan

Baik MJ, IS, maupun DW mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi materi kesiapsiagaan dari Pemkab Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

f. informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi

MJ, IS, dan DW mengaku kurang tahu terkait informasi bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul (Wawancara Pribadi, 8 dan 14 November 2021).

4.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan yang menjadi penghambat dalam kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada instansi-instansi terkait sebagai berikut.

4.2.3.1 Faktor Pendukung

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung untuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kabupaten Bantul, yaitu sistem informasi, manajemen, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Menurut beliau, SDM yang saat ini sudah tersedia dan sudah memiliki kemampuan yang baik dalam kebencanaan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Berkaitan dengan SDM, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD juga mengatakan bahwa faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan adalah SDM. Beliau mengatakan bahwa SDM yang ada sudah terlatih (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). PLT

Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda juga menjelaskan bahwa SDM yang sudah terlatih dan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung. Selain itu, beliau juga mengatakan adanya EWS yang berfungsi dengan baik juga menjadi salah satu faktor pendukung kesiapsiagaan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Pernyataan-pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Lurah Parangtritis dan Kamituwo Kelurahan Parangtritis yang mengatakan bahwa SDM yang sudah terlatih dan adanya dukungan baik dari BPBD maupun PMI, serta adanya pelatihan ke masyarakat lokal menjadi salah satu faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan (Wawancara Pribadi, 19 dan 11 November 2021). Ketua RT 05 juga mengungkapkan bahwa adanya SDM yang cekatan seperti SAR dan tenaga medis sangat membantu dan menjadi faktor pendukung kesiapsiagaan (Wawancara Pribadi, 14 November 2021) serupa dengan hal tersebut, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa sudah tersedianya Posko Terpadu di Pantai Parangtritis yang terdiri dari berbagai instansi dan relawan, PMI, Kepolisian, Polisi Air, sampai Satpol PP sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan dampak positif terhadap kesiapsiagaan, selain itu sarana prasarana seperti EWS dan petunjuk evakuasi yang sudah tersedia juga menjadi salah satu faktor pendukung kesiapsiagaan pemerintah (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Panewu Anom Kapanewon Kretek mengungkapkan bahwa adanya simulasi dan bantuan dana dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun kesiapsiagaan bencana (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Berkaitan dengan sarana prasarana, Ketua FPRB Paris Tangguh juga mengatakan bahwa adanya tempat evakuasi, penggunaan toa masjid sebagai alat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, dan Kerjasama antar instansi dan masyarakat menjadi faktor yang mendukung

dalam membangun kesiapsiagaan (Wawancara Pribadi, 22 November 2021).

Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa masing-masing instansi sudah memiliki komitmen dalam penanganan bencana, sehingga dapat menjadi (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Wakil Koordinator Tagana Bantul juga mengatakan bahwa menurut beliau koordinasi antar instansi sudah berjalan cukup baik (Wawancara Pribadi, 16 November 2021).

Ketua RT 06 mengatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait cara penyelamatan diri ketika terjadi tsunami menjadi faktor pendukung kesiapsiagaan bencana (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

4.2.3.2 Faktor Penghambat

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, *roadmap* pemerintah masih belum berkelanjutan. Selalu terdapat perubahan kebijakan disetiap pergantian pemerintah. Hal ini dianggap sebagai faktor penghambat karena seringkali kebijakan yang berubah juga mempengaruhi anggaran yang diberikan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Berkaitan dengan dana, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata juga mengatakan bahwa anggaran yang terbatas akan menyebabkan tidak luasnya koordinasi antar instansi (Wawancara Pribadi, 10 November 2021). Kasi Kesiapsiagaan BPBD juga mengatakan bahwa anggaran yang terbatas dan waktu menjadi faktor penghambat dari kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Beliau menjelaskan bahwa waktu yang tersedia di akhir tahun sudah sangat mepet sehingga kegiatan 43 sosialisasi dan 15 pelatihan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal (Wawancara Pribadi, 3 November 2021).

Menurut PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda, koordinasi menjadi salah satu faktor penghambat. Menurut beliau, ketika terjadi bencana seringkali tidak sesuai dengan apa yang sudah digladikan. Beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi bencana terjadi, mereka harus menunggu koordinasi sehingga masyarakat tidak

dapat langsung ditangani, selain itu sering terjadi tumpang tindih perintah dan cenderung setiap instansi jalan sendiri-sendiri (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang kesadaran akan bencana menjadi faktor penghambat. Hal ini dikarenakan masih ada alat-alat yang digunakan sebagai EWS dicuri atau dirusak oleh warga (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat di tingkat desa masih rendah karena mereka masih menganggap sebelah mata terhadap bencana (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Panewu Anom Kapanewon Kretek juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang karena masih membangun rumah di wilayah yang sangat dekat dengan pantai tanpa memikirkan risiko yang mungkin terjadi (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Selain itu, Lurah Parangtritis dan Kamituwo Kelurahan Parangtritis juga mengatakan bahwa kurangnya pengalaman bencana dan kurangnya kesaaran masyarakat akan bencana dapat menjadi faktor penghambat dalam membangun kesiapsiagaan bencana (Wawancara Pribadi, 19 dan 11 November 2021).

Menurut Ketua RT 05, program yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal dan belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan Ketua RT 06 yang mengatakan bahwa, upaya kesiapsiagaan pemerintah masih belum diterima oleh seluruh masyarakat. Beliau berpendapat kalau kemungkinan hal ini terjadi karena banyaknya warga yang ada tinggal di Desa Parangtritis serta banyaknya pendatang dan orang yang tinggal dengan cara mengontrak atau kos, sehingga proses penyampaian informasi tentang kesiapsiagaan tidak optimal (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

Sedangkan menurut Wakil Koordinator Tagana dan Ketua FPRB Paris Tangguh, hingga saat ini belum ada hambatan berarti yang sampai menghambat keberlangsungan program kesiapsiagaan bencana (Wawancara Pribadi, 16 dan 22 November 2021).

4.2.3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP mengatakan bahwa sudah ada upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi anggaran dana yang seringkali tidak mencukupi, yaitu dengan memberikan proposal kepada Bupati dan menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan, namun beliau mengatakan bahwa sampai sekarang upaya tersebut belum ditanggapi (Wawancara Pribadi, 8 November 2021). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kasi kesiapsiagaan BPBD yang menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta penambahan anggaran sebesar 10% dari tahun sebelumnya serta meminta penambahan SDM. Menurut beliau, Damkar, Tim Reaksi Cepat, dan Pusdalops sangat sering dilakukan penambahan SDM, sedangkan bidang lainnya jarang (Wawancara Pribadi, 3 November 2021). Sedangkan menurut Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata, untuk mengatasi kurangnya anggaran maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah kegiatan (Wawancara Pribadi, 10 November 2021).

PLT Kasubid Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda mengatakan bahwa pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai instansi menjadi bentuk upaya untuk mengatasi faktor penghambat. Namun beliau juga menjelaskan bahwa ketika gladi atau latihan, yang mengikuti bukanlah kepala bidangnya melainkan staf, sedangkan ketika terjadi bencana kepala bidang yang akan bertugas mengambil keputusan (Wawancara Pribadi, 8 November 2021).

Staf Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa sosialisasi ke masyarakat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bencana (Wawancara Pribadi, 19 November 2021). Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Bantul

mengatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan adalah tetap melakukan koordinasi dan melakukan pendekatan di tingkat desa (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Hal serupa juga diungkapkan oleh Lurah Parangtritis dan Kamituwo Kelurahan Parangtritis yang mengatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan, membentuk FPRB, dan merekrut banyak relawan (Wawancara Pribadi, 19 dan 11 November 2021).

Panewu Anom Kapanewon Kretek menjelaskan bahwa setiap kali ada pembinaan atau pertemuan, beliau berusaha untuk menyisipkan masalah kebencanaan agar masyarakat secara perlahan lebih sadar terhadap risiko bencana (Wawancara Pribadi, 15 November 2021). Sejalan dengan hal tersebut Ketua RT 05 mengatakn bahwa, untuk mengatasi faktor penghambat, maka dilakukan rapat antar pengurus RT dan Kelurahan (Wawancara Pribadi, 14 November 2021). Selanjutnya, Ketua RT 06 mengatakan bahwa radar gempa yang dibangun di dekat pantai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada (Wawancara Pribadi, 14 November 2021).

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pada penelitian ini dilakukan pengolahan data dengan melakukan kategorisasi, sistematisasi, serta melakukan pemaknaan jawaban dari hasil wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis. Proses pengolahan data ini bertujuan agar data yang telah didapatkan menjadi layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.3.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami terdiri dari lima parameter yaitu

pengetahuan, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi daya.

4.3.1.1 Pengetahuan

Pada parameter pengetahuan, diukur dengan menggunakan empat indikator yang berkaitan dengan pengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap bencana tsunami. Skor untuk setiap indikator adalah 2 untuk jawaban “ya” atau “ada” sedangkan skor 0 untuk jawaban “tidak” atau “tidak ada”. Skor maksimal pada parameter ini adalah 8. Tabel 4.4 memperlihatkan skor yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk parameter pengetahuan.

Tabel 4.4 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Parameter Pengetahuan

Parameter	Indikator		Status		Skor
			Ya	Tidak	
Pengetahuan	1.	Dapat menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan	✓		2
	2.	Dapat menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana	✓		2
	3.	Dapat menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana tsunami	✓		2
	4.	Dapat menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis	✓		2
	Jumlah skor				8
	Nilai skor maksimum				8
	Kesiapsiagaan untuk pengetahuan = (total skor riil/skor maksimum) x 100				100
	Kategori kesiapsiagaan parameter pengetahuan				Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada parameter pengetahuan adalah 100 atau sangat siap. Hal ini dikarenakan setiap instansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul dapat menjelaskan terkait dampak bencana, tipe-tipe

dan penyebab bencana, tingkat kerentanan masyarakat terhadap tsunami, serta dapat menjelaskan bagaimana kondisi dan rencana fasilitas kritis yang ada di Kabupaten Bantul khususnya di lingkungan sekitar Parangtritis.

4.3.1.2 Kebijakan

Pada parameter kebijakan, diukur dengan menggunakan delapan indikator yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait bencana tsunami. Skor untuk setiap indikator adalah 2 untuk jawaban “ya” atau “ada” sedangkan skor 0 untuk jawaban “tidak” atau “tidak ada”. Skor maksimal pada parameter ini adalah 16. Tabel 4.5 memperlihatkan skor yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk parameter kebijakan.

Tabel 4.5 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Parameter Kebijakan

Parameter	Indikator		Status		Skor
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan	1.	Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana	✓		2
	2.	Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat	✓		2
	3.	Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana	✓		2
	4.	Terdapat kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI	✓		2
	5.	Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan	✓		2
	6.	Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi	✓		2
	7.	Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan	✓		2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8.	Terdapat peraturan terkait sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan	✓		2
Jumlah skor					16
Nilai skor maksimum					16
Indeks per parameter = (total skor riil/skor maksimum) x 100					100
Kategori kesiapsiagaan parameter kebijakan					Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada parameter kebijakan adalah 100 atau sangat siap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki peraturan, kebijakan, maupun panduan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana (Lampiran 6).

4.3.1.3 Rencana Tanggap Darurat

Pada parameter rencana tanggap darurat, diukur dengan menggunakan 17 indikator yang berkaitan dengan rencana tanggap darurat yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya terkait bencana tsunami. Skor untuk setiap indikator adalah 2 untuk jawaban “ya” atau “ada” sedangkan skor 0 untuk jawaban “tidak” atau “tidak ada”. Skor maksimal pada parameter ini adalah 34. Tabel 4.6 memperlihatkan skor yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk parameter rencana tanggap darurat.

Tabel 4.6 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Parameter Rencana Tanggap Darurat

Parameter	Indikator	Status		Skor	
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	
Rencana Tanggap Darurat	1.	Tersedianya divisi pengelola bencana	✓		2
	2.	Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan	✓		2

1	2	3	4	5
	3. Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian	✓		2
	4. Tersedia peta bahaya tsunami dan peta evakuasi	✓		2
	5. Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi	✓		2
	6. Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat dan wisatawan	✓		2
	7. Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan	✓		2
	8. Tersedia nomor <i>hotline</i> informasi bencana	✓		2
	9. Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan)	✓		2
	10. Tersedia rencana penyelamatan korban bencana dan transportasi/sistem ambulan	✓		2
	11. Tersedia unit SAR dan protap	✓		2
	12. Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar	✓		2
	13. Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar	✓		2
	14. Tersedia prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat	✓		2
	15. Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat	✓		2
	16. Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK)	✓		2
	17. Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi)	✓		2
	Jumlah skor			34
	Nilai skor maksimum			34
	Indeks per parameter = (total skor riil/skor maksimum) x 100			100
	Kategori kesiapsiagaan parameter rencana tanggap darurat			Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada parameter rencana tanggap darurat adalah 100 atau sangat siap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dan menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana tanggap darurat khususnya untuk bencana tsunami. Namun perlu diperhatikan bahwa di Kapanewon Kretek tidak terdapat gedung khusus untuk tempat evakuasi tsunami melainkan berupa bukit, pemakaman, dan Kantor Kelurahan Parangtritis. Jumlah rambu jalur evakuasi yang tersedia juga sangat sedikit dan ditempatkan di lokasi yang tidak mudah dilihat oleh wisatawan.

4.3.1.4 Sistem Peringatan Bencana

Pada parameter sistem peringatan bencana, diukur dengan menggunakan enam indikator yang berkaitan dengan sistem peringatan bencana yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk menghadapi ancaman bencana tsunami. Skor untuk setiap indikator adalah 2 untuk jawaban “ya” atau “ada” sedangkan skor 0 untuk jawaban “tidak” atau “tidak ada”. Skor maksimal pada parameter ini adalah 12. Tabel 4.7 memperlihatkan skor yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk parameter sistem peringatan bencana.

Tabel 4.7 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Parameter Sistem Peringatan Bencana

Parameter	Indikator		Status		Skor
			Ya	Tidak	
1	2		3	4	5
Sistem Peringatan Bencana	1.	Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal		✓	0
	2.	Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan	✓		2
	3.	Terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana	✓		2
	4.	Terdapat prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana	✓		2

1	2		3	4	5
	5.	Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan serta protap pelaksanaan	✓		2
	6.	Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf	✓		2
Jumlah skor					10
Nilai skor maksimum					12
Indeks per parameter = (total skor riil/skor maksimum) x 100					83,33
Kategori kesiapsiagaan parameter sistem peringatan bencana					Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada parameter sistem peringatan bencana adalah 83,33 atau sangat siap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki sistem peringatan bencana untuk bencana tsunami, namun tidak ada pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional karena memang tidak terdapat peringatan bencana secara tradisional dikalangan masyarakat khususnya di sekitar Pantai Parangtritis.

4.3.1.5 Mobilisasi Sumber Daya

Pada parameter mobilisasi sumber daya, diukur dengan menggunakan 15 indikator yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk menghadapi ancaman bencana tsunami. Skor untuk setiap indikator adalah 2 untuk jawaban “ya” atau “ada” sedangkan skor 0 untuk jawaban “tidak” atau “tidak ada”. Skor maksimal pada parameter ini adalah 30. Tabel 4.8 memperlihatkan skor yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk parameter mobilisasi sumber daya.

Tabel 4.8 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Parameter Mobilisasi Sumber Daya

Parameter	Indikator		Status		Skor
			Ya	Tidak	
1	2		3	4	5
Mobilisasi Sumber Daya	1.	Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan	✓		2
	2.	Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana	✓		2
	3.	Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan)	✓		2
	4.	Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando	✓		2
	5.	Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah	✓		2
	6.	Tersedia protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab)	✓		2
	7.	Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana	✓		2
	8.	Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat	✓		2
	9.	Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana	✓		2
	10.	Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat	✓		2
	11.	Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan		✓	0
	12.	Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan	✓		2

1	2		3	4	5
	13.	Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi	✓		2
	14.	Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana	✓		2
	15.	Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev	✓		2
Jumlah skor					28
Nilai skor maksimum					30
Indeks per parameter = (total skor riil/skor maksimum) x 100					93,33
Kategori kesiapsiagaan parameter mobilisasi sumber daya					Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada parameter mobilisasi sumber daya adalah 93,33 atau sangat siap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memobilisasi sumber dayanya dengan baik, mulai dari mobilisasi sumber daya manusia sampai dengan memobilisasi dana untuk kesiapsiagaan bencana. Pada tabel tersebut juga diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum memberikan materi terkait kesiapsiagaan bencana yang mudah diakses bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait tsunami baru dilaksanakan sebanyak dua kali dan sejak tahun 2018 sampai saat ini belum ada sosialisasi kembali terkait tsunami.

Setelah dilakukan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk setiap parameter masuk ke dalam kategori sangat siap. Walaupun kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah sangat siap, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa, kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih ditujukan untuk masyarakat lokal dan belum memperhatikan wisatawan. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan tidak adanya melibatkan Dinas Pariwisata

dalam upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai. Pelibatan antar instansi di lingkungan Kabupaten Bantul terkait kesiapsiagaan bencana dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan. Hal tersebut diketahui dari pengakuan Ketua RT 05 dan Ketua RT 06 yang merasa kurang dilibatkan.

4.3.2 Pemahaman Masyarakat dan Wisatawan Terkait Kesiapsiagaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat lokal dan wisatawan terhadap kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami dilihat dari lima parameter yaitu pengetahuan, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi daya.

4.3.2.1 Pengetahuan

Masyarakat lokal maupun wisatawan sudah memahami bahwa Pantai Parangtritis memiliki risiko bencana tsunami. Baik masyarakat maupun wisatawan juga sudah memahami bahwa tsunami dapat berdampak pada kerugian harta benda, hilangnya nyawa, hilangnya mata pencaharian, dan hilangnya tempat tinggal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Parangtritis.

Wisatawan yang datang ke Pantai Parangtritis sudah memiliki pemahaman terkait penyebab terjadinya bencana tsunami bahwa tsunami dapat terjadi karena adanya gempa besar, kemudian ditandai dengan surutnya air laut secara tiba-tiba yang selanjutnya akan muncul gelombang besar ke arah daratan. Namun, masih ada masyarakat yang belum paham penyebab terjadinya tsunami. Meski demikian, baik masyarakat maupun wisatawan sudah mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami, yaitu dengan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan menjauhi pantai.

Menurut wisatawan, tingkat kerentanan masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis terhadap bencana tsunami adalah tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyak bangunan baik tempat berdagang maupun rumah warga yang berlokasi sangat dekat dengan pantai. Walaupun tidak mengetahui bagaimana tingkat kerentanan masyarakat, namun masyarakat sudah mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami, bagaimana cara menyelamatkan diri, dan kemana mereka harus pergi untuk menyelamatkan diri. Sedangkan berkaitan dengan fasilitas kritis, masyarakat mengetahui letak puskesmas terdekat, namun wisatawan tidak mengetahui letak maupun kondisi dari fasilitas kritis yang ada di Kabupaten Bantul.

4.3.2.2 Kebijakan

Kebijakan bersifat sebagai dasar dari seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Namun baik masyarakat lokal maupun wisatawan mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengerti kebijakan atau peraturan apa saja yang berlaku di Kabupaten Bantul terkait dengan kebencanaan.

4.3.2.3 Rencana Tanggap Darurat

Wisatawan menyebutkan bahwa sudah terdapat organisasi pengelola bencana di Kabupaten Bantul yaitu BPBD. Sedangkan masyarakat lokal lebih mengenal SAR sebagai organisasi pengelola bencana. Hal ini dikarenakan interaksi SAR dengan masyarakat lebih dekat dibandingkan dengan BPBD Kabupaten Bantul.

Baik masyarakat maupun wisatawan sudah memahami bahwa di setiap organisasi pasti memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab. Mereka memahami bahwa setiap anggota organisasi memiliki peran yang berbeda-beda, walaupun mereka kurang memahami bagaimana pembagian tugas secara detail.

Berkaitan dengan tempat evakuasi untuk bencana tsunami, masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis sudah mengetahui letak tempat

evakuasi tersebut. Mereka paham bahwa tempat evakuasi terdekat dari Pantai Parangtritis adalah Bulak Mabul yang dapat ditempuh dalam waktu 5 menit dengan menggunakan motor. Sedangkan walaupun wisatawan mengetahui bahwa terdapat bukit di dekat Pantai Parangtritis, namun mereka mengaku kalau mereka tidak mengetahui jalur menuju bukit tersebut. Mereka juga tidak mengetahui apakah bukit tersebut dijadikan tempat evakuasi atau tidak.

Masyarakat dan wisatawan tidak mengetahui informasi apapun terkait peta bahaya tsunami dan peta evakuasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kemudian berkaitan dengan rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi yang ada di sekitar Pantai Parangtritis, masyarakat sudah mengetahui hal tersebut. Masyarakat tahu dan paham apa isi dari rambu tanda bahaya maupun rambu jalur evakuasi. Namun wisatawan tidak mengetahui dan tidak memperhatikan ketersediaannya rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi. Masyarakat dan wisatawan juga mengaku bahwa mereka tidak mengetahui apakah terdapat rencana Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan rambu-rambu tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah menyediakan nomor *hotline* bencana yang dapat dihubungi selama 24 jam. Namun baik masyarakat maupun wisatawan tidak mengetahui apapun terkait nomor *hotline* informasi bencana tersebut.

Adanya Posko SAR di dekat Pantai Parangtritis tentu akan sangat membantu masyarakat dan wisatawan ketika terjadi bencana. Masyarakat setempat sudah mengetahui adanya SAR di dekat pantai, serta bagaimana peran SAR dalam membantu warga ketika terjadi bencana. Namun, wisatawan mengaku mereka tidak mengetahui kalau terdapat Posko SAR dan juga tidak mengetahui lokasi Posko SAR yang ada di sekitar Pantai Parangtritis.

Berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat, masyarakat mengatakan bahwa perlengkapan seperti tenda itu sudah tersedia khususnya di Balai Desa. Sedangkan wisatawan mengaku

tidak mengetahui terkait ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Salah satu indikator dalam kesiapsiagaan Pemerintah Daerah adalah dengan diadakannya latihan dan simulasi secara rutin yang melibatkan instansi dan publik. Namun wisatawan mengaku kalau mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan latihan atau simulasi bencana. Serupa dengan hal tersebut, masyarakat juga mengaku bahwa mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

4.3.2.4 Sistem Peringatan Bencana

Wisatawan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui apakah terdapat peringatan bencana tradisional yang diakui oleh pemerintah atau tidak serta wisatawan juga tidak mengetahui apakah terdapat teknologi sistem peringatan bencana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selain Buoy. Kemudian masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah Pantai Parangtritis belum pernah mengalami bencana tsunami yang besar, sehingga mereka mengaku bahwa tidak ada sistem peringatan bencana secara lokal. Masyarakat menjelaskan kalau terdapat instalasi peralatan dan teknologi sistem peringatan bencana yang didirikan oleh pemerintah. Mereka mengetahui wujud alat tersebut namun tidak memahami apa fungsi dari alat tersebut. Masyarakat juga mengetahui bahwa jika terjadi gempa, maka SAR akan memberikan informasi melalui pengeras suara. Sedangkan beberapa wisatawan tidak mengetahui bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Bantul menyebarluaskan peringatan bencana kepada masyarakat dan wisatawan.

4.3.2.5 Mobilisasi Sumber Daya

Sebagian wisatawan berpendapat bahwa dengan kondisi masyarakat yang tinggal sangat dekat dengan Pantai Parangtritis yang memiliki risiko tsunami, maka sudah pasti akan ada kesepakatan antara instansi dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sendiri memahami kalau mereka harus mengikuti arahan dari SAR ketika terjadi bencana. Namun

seandainya tidak ada informasi apapun yang mereka terima, sedangkan mereka melihat kondisi laut sudah menunjukkan tanda-tanda tsunami, maka mereka akan tetap menyelamatkan diri tanpa menunggu informasi dari SAR.

Berkaitan dengan komunikasi publik tentang informasi darurat, masyarakat sudah percaya dengan seluruh informasi yang diberikan oleh SAR. Mereka beranggapan bahwa informasi dari SAR dapat dipercaya sepenuhnya. Sedangkan wisatawan mengaku mereka kurang paham bagaimana komunikasi diberikan kepada masyarakat terkait informasi darurat.

Sebagai wilayah yang memiliki risiko bencana, maka pemerintah harus memastikan bahwa pelatihan kesiapsiagaan dapat sampai kepada seluruh kalangan masyarakat, namun masyarakat mengaku bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi terkait kesiapsiagaan. Mereka juga kurang paham apakah pelatihan dan sosialisasi itu memang ada atau tidak. Masyarakat dan wisatawan juga mengaku bahwa tidak mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyediakan materi terkait kesiapsiagaan yang mudah diakses atau tidak. Karena tidak ada sosialisasi apapun mengenai materi kesiapsiagaan tersebut baik ke masyarakat maupun ke wisatawan. Masyarakat dan wisatawan juga mengaku mereka kurang mengetahui terkait dokumen yang berisi tentang informasi bencana apa saja yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Bantul.

4.3.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Faktor penghambat, pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan didapatkan melalui wawancara kepada instansi-instansi yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat RT yang ada di Kelurahan Parangtritis.

4.3.3.1 Faktor Pendukung

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami. sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung. Hal ini dikarenakan sudah banyak personil-personil di setiap instansi yang terlatih dalam kesiapsiagaan bencana, banyaknya relawan yang tergabung dalam FPRB juga dapat membantu pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa atau kelurahan. Adanya FPRB sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari BPBD untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat sekitar. Pelatihan dan sosialisasi juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana. Pemahaman masyarakat lokal terhadap bencana juga menjadi salah satu dari faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut dikarenakan, jika pemahaman masyarakat terhadap bencana rendah, maka upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak apapun. Selain itu, sarana prasarana juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Tersedianya *early warning system* atau EWS dan juga adanya rambu-rambu jalur evakuasi membantu pelaksanaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Faktor pendukung yang terakhir adalah komitmen dan koordinasi antar instansi. Komitmen dan koordinasi antar instansi yang baik dapat melancarkan segala upaya kesiapsiagaan yang sudah direncanakan.

4.3.3.2 Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki beberapa faktor penghambat yaitu, anggaran dana yang terbatas menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak bisa melaksanakan kesiapsiagaan bencana secara optimal, selain itu jumlah kegiatan yang sangat banyak tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. Akibatnya, di akhir tahun masih banyak kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang belum dilaksanakan. Meskipun

koordinasi menjadi salah satu faktor pendukung, namun masih terdapat beberapa instansi yang merasa koordinasi antar instansi kurang baik khususnya ketika terjadi bencana. Selanjutnya, masih terdapat masyarakat yang memiliki kesadaran yang kurang terhadap bencana. Kurangnya kesadaran masyarakat ditunjukkan dengan adanya beberapa alat yang digunakan sebagai EWS justru dicuri atau dirusak. Kurangnya pengalaman bencana juga menjadi faktor penghambat dari kesiapsiagaan bencana. Kurangnya pengalaman bencana dapat menyebabkan masyarakat memandang sebelah mata terhadap bencana serta dapat menimbulkan kepanikan saat bencana terjadi. Faktor penghambat yang terakhir adalah penyampaian informasi yang belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih merasa informasi tentang kebencanaan yang diberikan oleh pemerintah sangat minim dan tidak merata.

4.3.3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Upaya yang pertama adalah dengan mengajukan penambahan dana kepada Bupati melalui proposal dari masing-masing instansi. Namun karena hingga saat ini belum ada tanggapan terkait pengajuan dana tersebut maka upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah kegiatan yang direncanakan. Upaya lain yang telah dilakukan untuk tetap menjaga koordinasi antar instansi dengan baik adalah dengan mengadakan gladi kebencanaan yang melibatkan berbagai instansi. Sedangkan untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat maka dilakukan pelatihan, sosialisasi, dan pendekatan di tingkat desa melalui berbagai pertemuan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat.

4.4 Hasil Analisis Data

Hasil analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang terdapat dalam penelitian ini mampu memberikan makna yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis data disajikan berdasarkan

kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami, pemahaman masyarakat dan wisatawan terkait kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis.

4.4.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan skor dari lima parameter yaitu, pengetahuan, kebijakan, rencana tanggap darurat, peringatan dini, dan parameter mobilisasi sumber daya, maka didapatkan skor kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis dengan cara dikalikan dengan bobot setiap parameter seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul

No.	Parameter	Bobot	Skor	Nilai terbobot (bobot x skor)
1.	Pengetahuan	0,08	100	8
2.	Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana	0,16	100	16
3.	Rencana Tanggap Darurat	0,34	100	34
4.	Peringatan Dini Bencana	0,12	83,33	9,99
5.	Mobilisasi Sumber daya	0,30	93,33	27,99
Total bobot		1,00		
Total nilai terbobot (indeks)				95,99
Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul				Sangat Siap

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai terbobot atau nilai indeks yang didapatkan adalah sebesar 95,99. Jika melihat Tabel 3.6 tentang kesiapsiagaan pemerintah, maka kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul masuk dalam kategori sangat siap. Namun, kesiapsiagaan yang dilakukan saat ini masih diprioritaskan kepada

masyarakat lokal di Kabupaten Bantul dan belum ditujukan untuk wisatawan. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya Dinas Pariwisata dalam upaya kesiapsiagaan.

4.4.2 Pemahaman Masyarakat dan Wisatawan Terkait Kesiapsiagaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan dari data yang telah terkumpul, diketahui bahwa masyarakat dan wisatawan sudah memahami dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi tsunami di Pantai Parangtritis. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis juga sudah memahami apa penyebab dari terjadinya bencana tsunami, tanda-tanda tsunami, dan bagaimana cara penyelamatan diri. Meskipun tidak semua masyarakat memahami apa penyebab bencana tsunami, namun masyarakat sudah mengetahui cara penyelamatan diri yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami, masyarakat juga mengetahui di mana letak fasilitas kritis terdekat. Wisatawan juga dapat memprakirakan bagaimana kerentanan masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis dengan melihat kondisi pemukiman yang ada. Namun wisatawan tidak mengetahui di mana letak dan bagaimana kondisi fasilitas kritis yang ada. Selain itu, masyarakat dan wisatawan masih belum mengetahui kebijakan dan peraturan apa yang telah dikeluarkan dan diberlakukan di Kabupaten Bantul terkait kesiapsiagaan bencana.

Masyarakat dan wisatawan sudah mengetahui organisasi pengelola bencana yang ada di Kabupaten Bantul. Mereka juga mengetahui bahwa terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap organisasi, dalam hal ini organisasi pengelola bencana. Masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Parangtritis juga sudah mengetahui letak tempat evakuasi tsunami, namun hal ini tidak diketahui oleh wisatawan. Meskipun wisatawan mengerti bahwa mereka harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, namun mereka tidak memahami jalur menuju tempat yang lebih aman tersebut. Pengetahuan terkait adanya rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat dan wisatawan

terhadap tempat evakuasi yang ada di sekitar Pantai Parangtritis. Masyarakat sudah mengetahui adanya rambu tanda bahaya dan rambu tempat evakuasi, namun wisatawan tidak melihat adanya rambu tempat evakuasi. Berkaitan dengan peta bahaya tsunami dan peta evakuasi, masyarakat dan wisatawan masih belum mengetahui hal tersebut dan tidak mengetahui adanya rencana pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait rambu-rambu maupun peta. Selain itu, masyarakat dan wisatawan juga masih belum mengetahui nomor *hotline* informasi bencana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Masyarakat sudah mengetahui bahwa terdapat Posko SAR di dekat Pantai Parangtritis, adanya peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat, dan mengetahui bahwa terdapat latihan dan simulasi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meskipun mereka tidak dilibatkan dalam latihan dan simulasi tersebut. Namun, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis masih belum mengetahui terkait adanya Posko SAR, peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat, maupun adanya latihan dan simulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tidak adanya pengalaman dalam menghadapi ancaman bencana tsunami yang besar di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis, menyebabkan tidak adanya sistem peringatan bencana secara lokal. Masyarakat mengetahui adanya instalasi peralatan dan teknologi sistem peringatan bencana tsunami yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Masyarakat juga sudah memiliki pemahaman terkait penyebaran informasi peringatan bencana yang dilakukan oleh SAR. Namun tidak semua wisatawan memiliki pemahaman berkaitan dengan sistem peringatan bencana yang ada di Kabupaten Bantul, sebagian wisatawan mengetahui bahwa penyebaran informasi dapat melalui pengeras suara yang ada.

Sebagian wisatawan memahami kalau terdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat. Masyarakat juga sudah

memahami kesepakatan yang ada, dalam hal ini antara SAR dengan masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan komunikasi publik mengenai informasi darurat, masyarakat hanya akan mempercayai informasi yang diberikan oleh SAR, sedangkan wisatawan tidak mengetahui bagaimana komunikasi publik tersebut dilakukan. Selanjutnya, pelatihan kesiapsiagaan ataupun sosialisasi, materi kesiapsiagaan, dan dokumen terkait informasi bencana yang pernah terjadi masih belum diketahui oleh masyarakat dan wisatawan.

4.4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain sumber daya manusia yang terlatih, dilaksanakannya sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan terhadap bencana, pemahaman masyarakat terkait bencana dan risiko bencana yang ada di sekitar tempat tinggalnya, sarana dan prasarana yang baik seperti EWS dan rambu-rambu evakuasi, komitmen dari masing-masing instansi dalam penanggulangan bencana, dan koordinasi antar instansi yang baik.

Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain adalah keterbatasan anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana, jumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang masih tersedia, masih adanya koordinasi yang kurang baik antar instansi, masih adanya masyarakat yang kesadaran terhadap bencananya kurang, kurangnya pengalaman bencana tsunami yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat yang belum optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan mengajukan penambahan dana melalui proposal yang ditujukan ke Bupati Bantul, pengurangan jumlah kegiatan yang direncanakan, menjaga

koordinasi antar instansi dengan mengadakan gladi kebencanaan, mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pendekatan di tingkat desa.

4.5 Interpretasi Data

Pada penelitian ini, interpretasi data dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data dengan beberapa kriteria terkait kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang meliputi pengetahuan, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

4.5.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul (Tabel 4.8), didapatkan nilai indeks sebesar 95,99 yang berarti kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman bencana tsunami khususnya di Kawasan Objek Wisata Pantai Parangtritis adalah sangat siap dengan rincian skor pengetahuan 100, skor kebijakan 100, skor rencana tanggap darurat 100, skor peringatan dini 83,33, dan skor mobilisasi sumber daya 93,33. Parameter peringatan dini tidak mendapatkan skor 100 karena di Kabupaten Bantul tidak terdapat pengakuan terhadap peringatan dini secara tradisional. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengalaman bencana tsunami besar yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan masyarakat hanya mengandalkan peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah. Pada parameter mobilisasi sumber daya, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mendapatkan skor 100 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memberikan materi tentang kesiapsiagaan yang mudah diakses bagi masyarakat dan wisatawan. Materi kesiapsiagaan tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang datang ke sosialisasi yang diadakan di Kantor Kelurahan Parangtritis. Meskipun kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul sangat baik, namun kesiapsiagaan ini hanya ditujukan kepada masyarakat dan

tidak ditujukan kepada wisatawan. Sehingga tidak ada pelibatan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.5.2 Pemahaman Masyarakat dan Wisatawan Terkait Kesiapsiagaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pemahaman masyarakat dan wisatawan berkaitan dengan pengetahuan bencana sudah baik. Hal ini dikarenakan masyarakat dan wisatawan mampu menjelaskan dampak, cara penyelamatan diri, dan bagaimana kerentanan masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis. Masyarakat juga sudah mengetahui letak fasilitas kritis terdekat, sedangkan wisatawan tidak mengetahui hal tersebut. Berkaitan dengan kebijakan, masyarakat dan wisatawan tidak memiliki pemahaman apapun terhadap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemahaman masyarakat terkait rencana tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah memahami adanya organisasi pengelola bencana yang ada, pembagian tugas dan tanggung jawab, letak tempat evakuasi, dan ketersediaan rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi di area Pantai Parangtritis, adanya unit SAR, tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat, serta adanya latihan yang dilakukan oleh pemerintah meskipun tidak melibatkan masyarakat. Namun masyarakat tidak mengetahui terkait peta bahaya tsunami, peta jalur evakuasi, rencana pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait peta maupun rambu yang ada, posko bencana, serta masyarakat tidak mengetahui nomor *hotline* informasi bencana yang dapat dihubungi. Sedangkan pemahaman wisatawan terhadap rencana tanggap darurat pemerintah adalah buruk, karena wisatawan hanya mengetahui adanya organisasi pengelola bencana dan adanya pembagian tugas serta tanggung jawab.

Pemahaman masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang ada di Kabupaten Bantul sudah sangat baik. Masyarakat dapat menjelaskan bahwa memang tidak ada peringatan bencana secara lokal atau tradisional. Masyarakat juga sudah memahami adanya instalasi dan teknologi terkait sistem peringatan bencana, serta memahami bagaimana penyebarluasan peringatan bencana, dalam hal ini dari SAR ke masyarakat. Sedangkan pemahaman wisatawan terkait sistem peringatan dini sangat buruk dikarenakan wisatawan sama sekali tidak mengetahui hal-hal tersebut.

Berkaitan dengan mobilisasi sumber daya, pemahaman masyarakat adalah buruk, hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengetahui adanya kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar, dalam hal ini antara SAR dengan masyarakat. Masyarakat juga memahami komunikasi publik tentang informasi keadaan darurat yang bertanggung jawab berasal dari SAR. Sedangkan masyarakat tidak memahami adanya pelatihan atau sosialisasi kebencanaan karena tidak pernah diikuti sertakan, mereka juga tidak pernah mendapatkan materi kesiapsiagaan ataupun sosialisasi terkait materi tersebut, masyarakat juga tidak mengetahui informasi bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul. Kemudian, hanya sebagian wisatawan yang memahami bahwa ada kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat sekitar, sedangkan untuk hal-hal lainnya seperti komunikasi publik, pelatihan, materi kesiapsiagaan, sosialisasi materi, dan informasi bencana alam yang pernah terjadi tidak dipahami oleh wisatawan, sehingga pemahaman wisatawan terhadap mobilisasi sumber daya adalah buruk.

4.5.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Dari hasil analisis, pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul didukung oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang terlatih, dilaksanakannya sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan terhadap bencana, pemahaman masyarakat terkait bencana dan risiko bencana yang ada di

sekitar tempat tinggalnya, sarana dan prasarana yang baik seperti EWS dan rambu-rambu evakuasi, komitmen dari masing-masing instansi dalam penanggulangan bencana, dan koordinasi antar instansi yang baik. Meskipun faktor-faktor pendukung tersebut belum dilaksanakan secara optimal, namun pelaksanaan kesiapsiagaan saat ini masih berjalan dengan baik.

Faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain adalah keterbatasan anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana, jumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang masih tersedia, masih adanya koordinasi yang kurang baik antar instansi, masih adanya masyarakat yang kesadaran terhadap bencananya kurang, kurangnya pengalaman bencana tsunami yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat yang belum optimal. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mengajukan penambahan dana melalui proposal yang ditujukan ke Bupati Bantul yang hingga saat ini masih belum mendapatkan tanggapan, pengurangan jumlah kegiatan dari yang sudah direncanakan, menjaga koordinasi antar instansi dengan mengadakan gladi kebencanaan, mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pendekatan di tingkat desa. Namun berdasarkan data yang di dapat, upaya-upaya tersebut juga masih belum dilakukan secara optimal sehingga faktor penghambat masih menjadi permasalahan dalam kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.6 Pembahasan

Pembahasan dilakukan pada data penelitian yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Peneliti melakukan analisis terhadap data penelitian dengan menghubungkan beberapa teori ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk selanjutnya dibuat kesimpulan dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

4.6.1 Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai indeks sebesar 95,99. Terdapat dua indikator yang tidak dimiliki atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu tidak adanya pengakuan terhadap peringatan dini lokal dan tidak adanya materi kesiapsiagaan yang mudah diakses oleh masyarakat dan wisatawan. Masyarakat Kabupaten Bantul hanya mengalami tsunami pada tahun 2006 dengan pusat gempa di Pangandaran, sehingga air yang sampai ke daratan tidak sampai merusak infrastruktur yang ada di sekitar Pantai Parangtritis. Persitiwa tersebut merupakan pengalaman bencana pertama yang didapatkan secara langsung oleh masyarakat setempat. Masyarakat lokal hanya mengandalkan peringatan dini yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga masyarakat memang tidak memiliki peringatan bencana secara lokal. Secara keseluruhan, kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul memang sudah sangat siap, namun kesiapsiagaan tersebut belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memprioritaskan kesiapsiagaan bencana tsunami dan sektor pariwisata. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pelibatan Dinas Pariwisata dalam kesiapsiagaan bencana yang dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Dermartoto (2019) yang mengatakan bahwa Dinas Pariwisata termasuk ke dalam pelaku pariwisata yang harus dilibatkan dalam pencegahan, kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi sosial dan rujukan terkait bencana. Pemerintah Kabupaten Bantul hanya menyediakan materi kesiapsiagaan berupa brosur atau buku saku yang hanya bisa didapatkan oleh masyarakat jika mereka mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang diadakan oleh pihak FPRB atau instansi pemerintah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyediakan materi kesiapsiagaan yang mudah diakses baik oleh masyarakat maupun wisatawan. Padahal, tidak semua masyarakat lokal diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun

pelatihan di Kantor Kelurahan, melainkan hanya perwakilan-perwakilan saja.

Terdapat satu indikator lain yang sebenarnya tidak dilakukan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terlibat dalam upaya kesiapsiagaan bencana, yaitu mengidentifikasi tanaman yang dapat dijadikan bahan pangan alternatif dalam keadaan darurat. Namun, meskipun pihak instansi tingkat kabupaten tidak melakukan identifikasi tersebut, pihak FPRB secara tradisional sudah mengetahui tanaman apa yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif, yaitu ketela dan daun pepaya. Tanaman tersebut juga banyak tumbuh di sekitar TEA. Selanjutnya, berkaitan dengan tingkat kerentanan masyarakat, sebagian besar instansi menjelaskan terkait pengetahuan masyarakat tentang tsunami dan bagaimana cara penyelamatan diri. Menurut Bakornas PB (2007), pengetahuan atau pendidikan termasuk ke dalam salah satu faktor kerentanan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menjelaskan kerentanan masyarakat dilihat dari aspek pendidikan.

Serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mison (2014) di Pacitan, masyarakat Kabupaten Bantul juga belum pernah terdampak tsunami secara langsung, namun Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyediakan berbagai program dan upaya terkait kesiapsiagaan bencana tsunami. Salah satu buktinya adalah dengan didirikannya radar tsunami, adanya Posko SAR, dibuatnya rambu-rambu jalur evakuasi meskipun jumlahnya belum banyak sehingga kurang diperhatikan oleh wisatawan, dan sebagainya.

4.6.2 Pemahaman Masyarakat dan Wisatawan Terkait Kesiapsiagaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sudah cukup baik, hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak mengetahui program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, meskipun masih terdapat program

yang tidak merata didapatkan oleh masyarakat seperti kegiatan pelatihan atau sosialisasi terkait kebencanaan yang hanya diberikan kepada perwakilan dari masyarakat. Walaupun pihak FPRB sudah menghimbau kepada peserta yang hadir untuk dapat menyebarkan pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan pelatihan atau sosialisasi kebencanaan ke keluarga maupun tetangga sekitar lingkungannya, nyatanya masyarakat mendapatkan pemahaman dengan melihat lingkungan sekitar dan dari SAR.

Instansi pemerintah yang paling dipercaya oleh masyarakat di Pantai Parangtritis adalah SAR. Hal ini dikarenakan personil SAR direkrut dari masyarakat sekitar yang kesehariannya berada di wilayah pantai dan sudah paham dengan kondisi laut. Selain itu, SAR dipandang oleh masyarakat sebagai tim yang cepat tanggap jika terjadi bencana maupun kecelakaan air, serta informasi yang diberikan oleh SAR dianggap valid dan dapat dipercaya. Meskipun BMKG sebagai pihak yang memiliki wewenang dari bencana gempa bumi dan tsunami, namun SAR menjadi instansi yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar Pantai Parangtritis.

Wisatawan tidak memiliki pemahaman terkait kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Meskipun wisatawan memiliki pengetahuan terkait bencana tsunami dan bagaimana cara penyelamatan diri, wisatawan tidak mengetahui ke arah mana mereka harus pergi untuk menyelamatkan diri. Hal ini dikarenakan jumlah rambu jalur evakuasi tidak banyak dan tidak ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh wisatawan. Rambu jalur evakuasi dipasang di jalanan pinggir pantai yang kurang strategis karena tidak banyak wisatawan yang berlalu lalang di jalan tersebut. Sehingga wisatawan tidak mengetahui keberadaan rambu jalur evakuasi. Padahal, rambu-rambu atau papan peringatan yang dipasang disekitar tempat wisata dapat menjadi alat penyampaian informasi dari pemerintah ke wisatawan secara tidak langsung. Pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNPB (2014) juga dijelaskan bahwa, rambu jalur evakuasi harus ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh orang lain.

4.6.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Pelaksanaan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul sangat baik karena didukung oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sumber daya manusia yang sudah terlatih, adanya sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, pemahaman masyarakat yang sudah cukup baik terhadap bencana, sarana dan prasarana seperti EWS yang berfungsi dengan baik dan adanya rambu jalur evakuasi, adanya komitmen dari masing-masing instansi dalam penanggulangan bencana, dan koordinasi antar instansi yang baik. Berdasarkan BNPB (2013), EWS menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting karena tidak semua tsunami terjadi dengan diawali tanda-tanda alam yang sama seperti adanya gempa atau surutnya air laut secara tiba-tiba. Seperti yang dialami oleh masyarakat Parangtritis ketika terjadi tsunami pada tahun 2006 yang ditandai dengan suara dentuman.

Meskipun kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul sangat baik, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan di Kabupaten Bantul yaitu terbatasnya anggaran dana, jumlah kegiatan yang banyak dibandingkan sisa waktu yang tersisa, masih ditemui koordinasi yang kurang baik antar instansi, masih adanya masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah sehingga melakukan pencurian dan merusak alat yang digunakan sebagai EWS, kurangnya pengalaman bencana tsunami yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bantul, serta penyampaian informasi ke masyarakat yang masih belum optimal. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait pelatihan atau sosialisasi kesiapsiagaan yang telah diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bantul ke perwakilan masyarakat yang diundang. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yaitu dengan mengajukan penambahan dana ke Bupati yang masih belum mendapatkan tanggapan, mengurangi jumlah

kegiatan dari yang sudah direncanakan, mengadakan gladi kebencanaan untuk menjaga koordinasi antar instansi, mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pendekatan di tingkat desa dengan melakukan pertemuan-pertemuan.